



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2023

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT AGAMA, PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Diterbitkan oleh

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas

Penanggung Jawab

Amich Alhumami, Ph.D

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas

Ketua

Didik Darmanto, S.Sos., MPA

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Anggota/Penyusun

Sularsono, SP, ME

Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng

Zaky Masul, S.Sos., MSP., MA

Cep Kiki Kusumah, S.Si, MA

Atisomya Nareswari, SE

Risky Firmansyah, SE

Ulia Balqis, S.Pd

Emhaka Yudhistira, S.Si

Muhammad Nashiruddin, S.Pd

Tenaga Pendukung

Novi Nur Asih, SE

Saniman

Editor

Rio Syahli, S.Sos.

Cetakan

Pertama, 2023

KATA PENGANTAR

Kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2012. Direktorat Pendidikan dan Agama memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Untuk itu, pada tahun 2021, telah dilakukan pemantauan terhadap capaian pelaksanaan rencana program pembangunan bidang pendidikan, dan upaya yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Laporan Akhir Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam pembangunan pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Perpustakaan Nasional pada Tahun 2023. Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil pemantauan terhadap perencanaan program, pencapaian sasaran program dan kegiatan serta realisasi anggarannya, dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini mengupas pelaksanaan serta permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang anggarannya melalui DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Informasi dan data hasil pemantauan untuk selanjutnya digunakan untuk perumusan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pembangunan pendidikan nasional selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Perpustakaan Nasional atas kerjasamanya dalam proses pemantauan dan penyediaan data dan informasi pencapaian program dan kegiatan. Selanjutnya, kami berharap bahwa Laporan ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk memberi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, namun juga bermanfaat dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan oleh kementerian/lembaga yang terkait dalam pembangunan pendidikan. Laporan akhir pemantauan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jakarta, Desember 2023

Didik Darmanto, S.Sos., MPA
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Sasaran.....	8
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II 11	
METODOLOGI KEGIATAN.....	11
2.1 Strategi Kegiatan.....	11
2.2 Penyusunan Instrumen dan Desain Monitoring.....	11
2.3 Pengumpulan Data dari Telaah Dokumen dan Diskusi dengan Berbagai Instansi.....	12
BAB III.....	13
HASIL KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN.....	13
DAN KEBUDAYAN TAHUN 2023.....	13
3.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....	14
3.1.1 Arah Kebijakan DAK.....	14
3.1.2 Sasaran dan Dukungan DAK.....	15
3.1.3 Lokasi Prioritas dan Kriteria.....	17
3.2 DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.....	20
3.2.1 Arah Kebijakan DAK.....	20
3.2.2 Sasaran dan Dukungan.....	21
3.2.3 Lokasi Prioritas dan Kriteria.....	22
3.3 DAK Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	23
3.3.1 Arah Kebijakan DAK.....	23
3.3.2 Sasaran dan Dukungan DAK Non Fisik Kebudayaan Tahun 2022.....	24
3.3.3 Kriteria Lokasi Prioritas.....	28
3.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA.2023.....	28
3.4.1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan.....	31
3.4.2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan.....	35
3.4.3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik Pendidikan.....	39
A. Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP).....	40
B. Aneka Tunjangan ASN Daerah.....	43
C. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya (BOP MTB).....	45
3.5 Hasil Evaluasi Tematik DAK Tahun 2023: Pemanfaatan Peralatan Praktik Utama Siswa di SMK.....	49
3.5.1 Pemantauan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Daerah.....	52
3.4.2 Kunjungan ke Kota Bandung, Jawa Barat.....	52
3.4.4 Kunjungan ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.....	61
3.4.5 Kunjungan ke Kota Surabaya, Jawa Timur.....	69
3.4.6 Kunjungan ke Kota Malang, Jawa Timur.....	74
BAB IV 77	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Rekomendasi.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anggaran Pendidikan dalam APBN	13
Gambar 2 DAK Perpustakaan 2021 Kab. Agam dan 2022 Kab. Kepulauan Tidore	38
Gambar 3 DAK Perpustakaan 2019 Kab.Seram Bagian Timur dan 2020 Kab.Merauke	38
Gambar 4 Jenis DAK Non Fisik Pendidikan	40
Gambar 5 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 4 Bandung, Jawa Barat	53
Gambar 6 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 13 Bandung, Jawa Barat	54
Gambar 7 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 7 Bandung, Jawa Barat	55
Gambar 8 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 1 Cibinong, Jawa Barat.....	56
Gambar 9 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 2 Cibinong, Jawa Barat.....	59
Gambar 10 Kunjungan Lapangan DAK di PKBM Anak Panah Cibinong, Jawa Barat	60
Gambar 11 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 1 Mataram, NTB	62
Gambar 12 Kunjungan Lapangan SMKPK di SMKN 7 Mataram, NTB	65
Gambar 13 Kunjungan Lapangan DAK di Museum NTB	67
Gambar 14 Fitur Scan Barcode Museum NTB Sekardiyu Audio Guide (SEGA).....	67
Gambar 15 Kunjungan Lapangan DAK di Taman Budaya NTB.....	69
Gambar 16 Stakeholders UPT Taman Budaya Cak Durasim, Jawa Timur.....	72
Gambar 17 Kunjungan Lapangan DAK di Taman Budaya Cak Durasim, Jawa Timur	74
Gambar 18 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 4 Malang, Jawa Timur	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Subbidang dan Menu DAK Fisik Pendidikan	15
Tabel 2 Outcome, Immediate Outcome dan Output DAK Fisik Pendidikan	15
Tabel 4 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam Renstra	16
Tabel 5 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam Renstra	16
Tabel 6 Kriteria DAK Fisik Pendidikan	19
Tabel 7 Outcome, Immediate Outcome, Output, Sasaran Output dan Target Tahunan dan Jangka Menengah	21
Tabel 8 Capaian Hasil Jangka Pendek (Immediate Outcome)	22
Tabel 9 Kriteria Pendukung DAK Subbidang Perpustakaan	23
Tabel 10 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam RPJMN	25
Tabel 11 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam Renstra (APK)	26
Tabel 12 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam Renstra (AN)	26
Tabel 17 Tren Alokasi DAK Fisik Pendidikan per Tahun	29
Tabel 18 Tren Alokasi DAK Non Fisik Pendidikan per Tahun	30
Tabel 19 Tren Alokasi DAK Fisik Pendidikan Subbidang Perpustakaan per Tahun	31
Tabel 20 Realisasi DAK Fisik Pendidikan Non Perpustakaan TA.2023	32
Tabel 21 Evaluasi Substansial Perencanaan DAK Fisik TA.2023	33
Tabel 22 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan TA.2023	34
Tabel 23 Progress Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan	34
Tabel 24 Tren Pagu Anggaran DAK Fisik Perpustakaan	36
Tabel 25 Anggaran DAK NonFisik Pendidikan 2023	40
Tabel 26 BA Penambahan BOSP TA.2023	41
Tabel 27 BA Penambahan BOSP TA.2023 Lampiran	41
Tabel 28 Kebijakan Penyaluran BOSP per Tahun	42
Tabel 29 Linimasa Penerimaan Dana BOS Reguler	43
Tabel 30 Linimasa Penerimaan Dana BOP Reguler	43
Tabel 31 Penyaluran Aneka Tunjangan Guru.....	44
Tabel 32 Realisasi Aneka Tunjangan Guru	45
Tabel 33 Anggaran Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya (BOP MTB)	46
Tabel 34 Angka Serapan Museum pada Laporan Tahap 1 TA.2023	46
Tabel 35 Angka Serapan Taman Budaya pada Laporan Tahap 1 TA.2023	46
Tabel 36 Museum dan Taman Budaya belum menyampaikan Laporan Tahap 1 TA.2023	47
Tabel 13 Tabel Rincian Bantuan Peralatan di SMKN 2 Cibinong, Jawa Barat	58
Tabel 14 Realisasi Anggaran Museum NTB berdasarkan SP2D per November 2023	66
Tabel 15 Anggaran DAK Taman Budaya Cak Durasim Jawa Timur	70
Tabel 16 Temuan Kebutuhan RPS dan Peralatan di SMKN 4 Malang, Jawa Timur.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai cita-cita luhur menyejahterakan bangsa seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat tentang visi, misi dan program Presiden.

Salah satu tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 2 ayat (4) adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan mengharuskan dilakukannya pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana sebagai bagian dari siklus tahapan perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang SPPN tersebut disebutkan bahwa masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan menghimpun serta menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara pada ayat (2) disebutkan, bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian sudah menjadi tugas Bappenas untuk melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan ini kemudian secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. Dalam hal ini Pengendalian diartikan sebagai serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Pasal 1 angka 1).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan dan target yang telah direncanakan, pada tahun anggaran terkait dilaksanakan kegiatan pengendalian strategis terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan lebih khususnya lagi yang mencakup Dana Alokasi Khusus. Pengendalian strategis pada prinsipnya dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi sejauh mana perencanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan, dengan membandingkan terhadap perencanaan sumber daya yang ada. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, pencapaian target, dan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya b No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada proses selanjutnya, regulasi ini disempurnakan melalui penerbitan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang No.25 Tahun 1999).

Pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwasebesar Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, Pasal 162 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Dalam menjalankan kebijakan DAK, langkah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu sebesar (i) penetapan program dan kegiatan, (ii) penghitungan alokasi DAK, (iii) arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan (iv) administrasi pengelolaan DAK. Pada tulisan ini, penulis hanya akan mencoba membahas proses penetapan program dan kegiatan serta perhitungan alokasi DAK. Pada prinsipnya, DAK bidang pendidikan diselenggarakan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan Indonesia. Arah kebijakan untuk DAK adalah sebagai berikut

DAK Fisik Bidang Pendidikan

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah
- b. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan subbidang Perpustakaan

Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

DAK Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas.

2. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

Faktanya, sekitar > 60 persen Anggaran Pendidikan dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain DAK Fisik, dan DAK Non Fisik (tambahan penghasilan guru, TPG, TKG, BOS, BOP). Hal inilah yang menjadi landasan bagi kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

Melalui kegiatan ini akan dapat diperoleh gambaran mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Selain itu melalui kegiatan ini juga akan dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan upaya apa yang perlu diambil untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi rekomendasi masukan bagi kebijakan pada periode berikutnya.

1.2 Tujuan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan serta permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sehingga dapat menyusun tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan untuk akselerasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta perencanaan pembangunan pendidikan selanjutnya.

1.3 Sasaran

Kegiatan Pengendalian Strategis Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan tahun 2023 memiliki sasaran sebagai berikut

1. Mengamati proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menyusun tindak lanjut yang diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan dapat melakukan akselerasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
4. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk perencanaan pembangunan pendidikan selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berupa

1. Penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam buku Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan TA 2023 ini akan disampaikan dengan sistematika berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan TA 2023.

BAB II METODOLOGI KEGIATAN

Pada bab ini dijelaskan penyusunan instrumen dan desain monitoring, pengumpulan data dari telaah dokumen dan studi lapangan, diskusi dengan instansi terkait, serta analisis data yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta upaya apa yang perlu diambil untuk menindaklanjuti

permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi rekomendasi masukan bagi kebijakan pada periode berikutnya.

BAB III HASIL KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN TA 20223

Bagian ini menjelaskan mengenai hasil kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yang diperoleh dari pengumpulan data laporan dan hasil pertemuan rapat. Selama tahun 2023 dilakukan lima kali studi lapangan serta diskusi ke daerah dengan mengunjungi sekolah, museum, taman budaya dan instansi terkait, selain itu telah dilaksanakan diskusi pembahasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK di tingkat Pusat bersama K/L terkait.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pengendalian strategis dan kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di masa yang akan datang.

BAB II METODOLOGI KEGIATAN

Pada bab ini dijelaskan penyusunan instrumen dan desain monitoring, pengumpulan data dan studi lapangan, diskusi dengan instansi terkait, serta analisis data yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta upaya apa yang perlu diambil untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga dapat menjadi rekomendasi masukan bagi kebijakan pada periode berikutnya.

2.1 Strategi Kegiatan

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah melalui pengumpulan data laporan dan hasil pertemuan rapat. Pada tahun 2023, sistem monitoring dan evaluasi di Kemendikbudristek yaitu SIMDAK dan E-Planning digunakan sebagai basis data perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi bagi unit teknis pelaksana di Daerah.

Dilakukan lima kali studi lapangan ke Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kota Mataram dan Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Surabaya dan Kota Malang. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi forum diskusi dengan sekolah, museum, taman budaya dan instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Bappeda, dan UPT Daerah Taman Budaya. Instrumen dan desain monitoring yang digunakan diarahkan untuk menjadi rekomendasi masukan bagi kebijakan pada periode berikutnya.

2.2 Penyusunan Instrumen dan Desain Monitoring

Instrumen dalam Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun untuk memperoleh informasi lengkap mengenai keseluruhan proses kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar informasi yang diperlukan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Di dalam instrumen ini juga memuat pertanyaan mengenai permasalahan yang

dihadapi dalam kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dialami baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, serta Pemerintah Daerah.

2.3 Pengumpulan Data dari Telaah Dokumen dan Diskusi dengan Berbagai Instansi

Data diperlukan untuk menyusun variabel guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini berupa data primer dan data sekunder.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer pada laporan ini melalui wawancara dan diskusi dengan berbagai instansi. Data primer adalah data yang didapatkan dalam bentuk mentah, baru dan langsung dari sumbernya. Sehingga bukan merupakan data yang sudah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.

Metode pengumpulan data dengan teknik kualitatif yaitu wawancara, observasi dan diskusi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab atau ditanggapi. Kemudian dilakukan teknik kuantitatif yaitu analisis data pelaksanaan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi dengan menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur.

BAB III

HASIL KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

Faktanya, sekitar lebih dari 60 persen Anggaran Pendidikan dialokasikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain DAK Fisik, dan DAK Non Fisik (tambahan penghasilan guru, TPG, TKG, BOS, BOP). Hal inilah yang menjadi landasan bagi kegiatan Koordinasi Penyusunan DAK Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan TA 2023. Melalui kegiatan ini akan dapat diperoleh gambaran mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Berikut ini adalah rincian Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendidikan periode Tahun 2019-2023.



Gambar 1. Anggaran Pendidikan dalam APBN

Berdasarkan data rincian Anggaran Pendidikan dalam APBN setiap tahun, terjadi fluktuasi dari proporsi TKD setiap tahun yaitu penurunan akibat Pandemi COVID19 sebesar -5,95% di Tahun 2020, -3,94% di Tahun 2021, kemudian diikuti dengan kenaikan melalui strategi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 4,29% di Tahun 2022 dan 6,60% di Tahun 2023.

3.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

3.1.1 Arah Kebijakan DAK

Pada prinsipnya, DAK bidang pendidikan diselenggarakan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan Indonesia. Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan

- DAK Bidang Pendidikan mendukung arah kebijakan RKP 2024 yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- DAK Bidang Pendidikan mendukung PN 3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 4. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas KP 2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun dan PN 3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing KP 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
- Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional

DAK Fisik Pendidikan terdiri dari subbidang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB, dan SMK. DAK Fisik Pendidikan menerapkan konsep ketuntasan dan memiliki 1-2 menu kegiatan pada setiap subbidang dengan penambahan rincian menu Pembangunan Unit Sekolah Baru PAUD, Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB, dan Asrama Siswa SMP.

Subbidang	Menu
Subbidang PAUD	Revitalisasi PAUD
	Pembangunan Baru PAUD
Subbidang SD	Revitalisasi SD

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Subbidang SMP	Revitalisasi SMP (usulan baru Asrama Siswa)
Subbidang SKB	Revitalisasi SKB (usulan baru RKB)
Subbidang SMA	Revitalisasi SMA
	Pembangunan Baru SMA
Subbidang SLB	Revitalisasi SLB
	Pembangunan Baru SLB
Subbidang SMK	Revitalisasi SMK
	Pembangunan Baru SMK

Tabel 1 Subbidang dan Menu DAK Fisik Pendidikan

3.1.2 Sasaran dan Dukungan DAK

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023 memiliki sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang selaras dengan RPJMN maupun Renstra Kemendikbudristek. Target dan sasaran berupa *outcome*, *output* dan *immediate outcome* dalam RKP. Pada tahun ini, dipetakan *output* masing-masing subbidang sebagai target penyelesaian satuan pendidikan.

Outcome	Immediate Outcome	Output	Sasaran Output	Target 2024
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat penyelesaian Pendidikan Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 	Persentase satuan pendidikan yang sarana prasarannya memenuhi 90% Standar Nasional Pendidikan	28.830 satuan pendidikan yang direvitalisasi	PAUD yang direvitalisasi	2.103 satuan pendidikan
			SD yang direvitalisasi	14.426 satuan pendidikan
			SMP yang direvitalisasi	5.637 satuan pendidikan
			SKB yang direvitalisasi	750 satuan pendidikan
			SMA yang direvitalisasi	2.504 satuan pendidikan
			SLB yang direvitalisasi	446 satuan pendidikan
			SMK yang direvitalisasi	2.964 satuan pendidikan
Persentase siswa yang memanfaatkan	47 USB yang dibangun	USB yang dibangun	47 satuan pendidikan	

Tabel 2 Outcome, Immediate Outcome dan Output DAK Fisik Pendidikan

Saran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target	
	2019	2022	2023	2024
PN 3 - PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				
1. Tingkat penyelesaian pendidikan (%)				
SD/MI/ sederajat	95,48	97,82	98,41	98,94
SMP/MTs/ sederajat	85,23	90,13	91,08	93,33
SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33	66,13	69,68	71,71
1. Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30	63,28	63,55	64,38
PN 3 - PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing				

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target	
	2019	2022	2023	2024
1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	42,76	38,53	39,74	40,90

Tabel 4 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam RPJMN

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.1 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam Renstra

Indikator	Baseline	Realisasi	Target	
	2020	2022	2023	2024
1. Angka Kesiapan Sekolah	74,96	74,34	75,59	75,59
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,26	99,10	99,32	99,34
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	95,74	95,92	96,34	96,55
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	84,53	85,49	92,80	95,00

Tabel 3 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam Renstra

Nilai kompetensi minimum Asesmen Kompetensi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Indikator	Realisasi (%)		Target (%)	
	2022	2023	2023	2024
1. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum (Literasi)	59,49	49,75	52,00	
1. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum (Numerasi)	45,24	29,20	30,10	

Tabel 4 Sasaran Outcome DAK Fisik Pendidikan dalam Renstra

DAK Fisik Bidang Pendidikan diselenggarakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN). Dukungan terhadap PN, PP, KP hingga MP dalam RKP 2023 adalah sebagai berikut

PN PN 3 Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PP PP 4 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

KP KP 2 Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

PN PN 3 Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PP PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

KP KP 1 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 (di 31 SMK yang mendukung sektor makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia termasuk farmasi)

Dukungan terhadap Kebijakan Lainnya sebesar

SDGs Tujuan 4

Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran relevan dan efektif.

Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

3.1.3 Lokasi Prioritas dan Kriteria

Lokasi prioritas menjadi isu penting dalam penetapan DAK Fisik TA 2024. DAK Fisik TA 2024 sudah menggunakan interkoneksi dengan Dapodik yang memudahkan proses pengusulan dan penilaian. Pada proses penilaian DAK Fisik Pendidikan memperhatikan kriteria lokasi prioritas dan kriteria penilaian sebagai berikut

1. Menu Revitalisasi

- a. Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau pengadaan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.
- b. Memberikan keberpihakan pada 107 Kab/kota daerah afirmasi.
- c. Memberikan keberpihakan pada daerah dengan kinerja pendidikan yang masih rendah (APK di bawah angka nasional), perhitungan kepadatan

rombel, dan daerah afirmasi untuk rincian kegiatan pembangunan RKB subbidang SMP, SMA, SLB, dan SMK, serta pertimbangan daerah afirmasi untuk kegiatan pembangunan RKB subbidang PAUD, dan SD.

- d. Daerah yang memiliki SMK dengan kompetensi keahlian yang mendukung pengembangan sektor prioritas nasional.
- e. Daerah terdampak bencana
- f. Daerah Kemiskinan ekstrim
- g. Daerah yang tercakup dalam Inpres 9/2020 (Papua)

2. Menu Pembangunan Baru (USB)

- a. Unit Sekolah Baru (USB) untuk daerah yang membutuhkan, tidak memiliki satuan pendidikan jenjang menengah, PAUD, dan tidak mampu (khususnya untuk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah)
- b. Daerah terdampak bencana
- c. Daerah dengan kinerja pendidikan menengah yang masih rendah (APK di bawah angka nasional) dan daerah afirmasi untuk rincian kegiatan pembangunan USB regular subbidang PAUD, SMA, SLB, dan SMK, serta pertimbangan daerah afirmasi untuk kegiatan pembangunan USB berasrama subbidang SMA.

3. Daerah dengan Kapasitas Fiskal yang tidak memadai dan rapor kinerja daerah yang rendah akan menjadi prioritas.

Kriteria penilaian DAK Fisik Bidang Pendidikan disusun untuk menentukan usulan yang akan disetujui dari sekian banyak usulan yang masuk. Kriteria penilaian yang disepakati adalah sebagai berikut

- 1. Satuan pendidikan (TK Negeri, TK Swasta akreditasi A dan B, SD, SMP, SMA, SLB, SKB, serta PKBM akreditasi A dan B) pada daerah dengan kinerja pendidikan rendah dan kemampuan fiskal rendah, dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah
- 2. Satuan pendidikan (SMK) pada daerah dengan kinerja pendidikan rendah dan kemampuan fiskal rendah yang mendukung pembangunan/pengembangan

kawasan prioritas, pelaksanaan *Major Project*, dan pengembangan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri).

3. Satuan Pendidikan dengan kondisi prasarana rusak dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau pengadaan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.
4. Kriteria satuan pendidikan yang ditargetkan mendapat DAK Fisik TA 2024 adalah sebagai berikut

Kriteria	Penjelasan
Kriteria Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NPSN 2. Mengisi Dapodik 2 tahun terakhir 3. Menerima BOS/BOP
Jumlah Siswa Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD/SMP/SMA/SMK sebesar > 60 siswa kecuali daerah afirmasi 2. PAUD sebesar > 24 siswa 3. SKB/PKBM sebesar > 40 siswa

Tabel 5 Kriteria DAK Fisik Pendidikan

5. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan dan bekerjasama dengan Dinas PUPR melalui Dapodik.
6. Kinerja Pelaksanaan DAK tahun sebelumnya yang termasuk penyerapan dana dan capaian output.
7. Kinerja Pelaksanaan DAK tahun sebelumnya yang termasuk penyerapan dana dan capaian output.
8. Capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) DAK Fisik tahun 2022.

Untuk perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2024 digunakan referensi bidang pendidikan yang diperoleh dari interkoneksi data dengan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara untuk pembangunan baru menggunakan data referensi tingkat kecamatan dengan kriteria khusus.

Penerapan konsep ketuntasan menjadi poin penting yang ditekankan setelah pada tahun-tahun sebelumnya kurang optimal. Hingga DAK Fisik 2024 dilaksanakan konsep ketuntasan belum optimal bisa terfasilitasi aplikasi KRISNA, sehingga perlu perbaikan pada aplikasi. Strategi yang dilakukan untuk menjamin ketuntasan sekolah diantaranya

- a. Dalam menerapkan konsep ketuntasan di dalam aplikasi KRISNA DAK, pengusulan akan menggunakan titik awal satuan pendidikan (NPSN). Dalam

aplikasi KRISNA DAK setelah sub bidang langsung masuk ke lokus satuan pendidikan (*by reference*).

- b. Usulan daerah adalah satuan pendidikan yang akan diintervensi. Daerah harus melakukan pengusulan secara utuh kebutuhan per satuan pendidikan (rincian menu, volume, dan *unit cost*) berdasarkan asesmen dari Dapodik.
- c. Pada proses pengusulan oleh Daerah, Daerah mengusulkan satuan pendidikan yang akan diintervensi melalui DAK. Dalam aplikasi KRISNA DAK setiap referensi sudah dilakukan penguncian pada tataran rincian menu sesuai Dapodik.
- d. Dalam rangka memastikan intervensi konsep ketuntasan untuk setiap satuan pendidikan pada DAK Fisik Pendidikan pada proses sinkronisasi dapat dilakukan penyesuaian volume dan unit cost serta rincian menu merujuk pada Dapodik.

Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dapat optimal, disepakati hal-hal sebagai berikut

1. Dalam hal terdapat belanja K/L yang mendanai kewenangan daerah maka harus disinkronisasikan dengan DAK Fisik, agar saling mendukung dalam pencapaian target output yang diharapkan.
2. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan DAK Fisik di daerah, petunjuk teknis ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran selanjutnya dan untuk jukops yang mengatur ketentuan standar dan bersifat umum diberlakukan lintas tahun.

3.2 DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan DAK

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah diberikan untuk perpustakaan yang berada dibawah OPD Provinsi yang menangani urusan perpustakaan. DAK Fisik Subbidang Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan untuk Perpustakaan Umum Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan tujuh rincian menu sebagai berikut

1. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
2. Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Pengadaan Bahan Perpustakaan (Cetak dan/atau Digital)

3.2.2 Sasaran dan Dukungan

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2024 memiliki sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang selaras dengan RPJMN Target dan sasaran berupa *outcome*, *output* dan *immediate outcome* dalam RKP. Sesuai amanat Perpres Petunjuk Teknis DAK Fisik, pemerintah daerah diminta melaporkan capaian hasil jangka pendek untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun selanjutnya.

Outcome	Immediate Outcome	Output	Target 2024
1. Meningkatnya rata-ratanilai PISA –membaca dari 371 (2019) menjadi 396 pada tahun 2024	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan Perpustakaan	Perpustakaan daerah yang sarana dan prasarana layanannya dikembangkan	126 perpustakaan daerah
2. Meningkatnya Nilai Dimensi Budaya Literasi dari 55 (2018) menjadi 71 pada tahun 2024			

Tabel 6 Outcome, Immediate Outcome, Output, Sasaran Output dan Target Tahunan dan Jangka Menengah

Sesuai amanat Perpres Petunjuk Teknis DAK Fisik, pemerintah daerah diminta melaporkan capaian hasil jangka pendek untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan dan pengalokasian tahun selanjutnya. Tabel data capaian hasil jangka pendek sebagai berikut

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rincian Menu	Indikator Capaian	Target dan Satuan	Tata Cara Penghitungan	Penerima Manfaat	Target nasional	Target per daerah
Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah	1. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota 2. Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 4. Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 5. Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6. Pengadaan Bahan Perpustakaan (Cetak dan/atau Digital)	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya (yoy)	Membandingkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara langsung (onsite) dan dalam jaringan (online) pada periode Januari-Mei 2024 dengan Januari Mei 2025	Masyarakat yang memanfaatkan layanan Perpustakaan	10%

Tabel 7 Capaian Hasil Jangka Pendek (Immediate Outcome)

DAK Fisik Sub Bidang Peerpustakaan Daerah diselenggarakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN). Dukungan terhadap PN, PP, KP hingga MP dalam RKP 2022 adalah sebagai berikut

PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

PP 4 Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

KP 1 Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP 4 Meningkatkan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

KP 1 Peningkatan Budaya Literasi

3.2.3 Lokasi Prioritas dan Kriteria

Lokasi prioritas menjadi isu penting dalam penetapan DAK Fisik TA 2024. Perpunas bersama Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan mengerucutkan lokasi prioritas dengan kriteria sebagai berikut

Kriteria Utama

1. Kelembagaan dan nomenklatur Dinas/Badan Perpustakaan;
2. Layanan perpustakaan belum sesuai SNP atau akreditasi dengan nilai C (ruang layanan, koleksi, perabot, TIK);
3. Terdapat di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) berdasarkan Perpres No. 63/2020 dan Perpres No. 118/2022;
4. Lokasi yang menjadi stock program DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2023; dan/atau
5. Kapasitas fiskal daerah rendah.

Kriteria Pendukung

Rincian Menu	Kriteria Pendukung	Jumlah Lokpri
Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota	Kepemilikan dan kondisi gedung layanan perpustakaan (sewa/ menumpang (belum milik sendiri)/ rusak berat/ rusak sedang)	51 kab/kota
Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		3 provinsi dan 10 kab/kota
Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		1 provinsi dan 3 kab/kota
Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Sarana layanan belum memadai (koleksi, perabot, TIK)	3 provinsi dan 85 kab/kota
Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/ Kota		2 provinsi dan 75 kab/kota
Pengadaan Bahan Perpustakaan (Cetak dan/atau Digital)		3 provinsi dan 62 kab/kota

Tabel 8 Kriteria Pendukung DAK Subbidang Perpustakaan

3.3 DAK Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

3.3.1 Arah Kebijakan DAK

DAK Non Fisik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mendukung kebijakan

- a. DAK Bidang Pendidikan mendukung arah kebijakan RKP 2024 yaitu peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. DAK Bidang Pendidikan mendukung PN 3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PP 4. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas KP 1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan KP 2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun, serta PP 7. Peningkatan Produktivitas

dan Daya Saing KP 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Selain itu, DAK Bidang Pendidikan juga mendukung PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PP 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan KP 1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, KP 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya, dan KP 5. Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan.

- c. Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas.
- d. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

3.3.2 Sasaran dan Dukungan DAK Non Fisik Kebudayaan Tahun 2022

Pada TA 2024, DAK Non Fisik terbagi kedalam tiga kategori yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Aneka Tunjangan Guru, dan BOP Museum dan Taman Budaya (MTB), dengan rincian sebagai berikut

a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk 43.719.223 peserta didik;
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja untuk 11.769 sekolah penggerak, 2.744 sekolah prestasi, dan 30.917 sekolah yang memiliki kemajuan terbaik
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Reguler untuk 6.334.800 peserta didik;
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Kinerja untuk 4.777 satuan pendidikan penggerak;
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk 910.806 peserta didik;

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk 1.199 satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik..

b. Tunjangan Guru ASN Daerah

- Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 943.326 guru PNS dan 157.249 guru PPPK;
- Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) untuk 124.340 guru PNS dan 398.111 guru PPPK
- Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah khusus untuk 34.421 guru PNS dan 13.166 guru PPPK

c. BOP MTB

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum untuk 115 Museum; dan
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Taman Budaya untuk 23 Taman Budaya.

Kegiatan DAK Non Fisik Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020, sebagaimana berikut

Target (Outcome)

Sasaran Outcome BOSP dan Tunjangan Guru ASN Daerah

Tingkat penyelesaian Pendidikan dan lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (RPJMN 2020-2024)

Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target	
	2019	2022	2023	2024
PN 3 - PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				
1. Tingkat penyelesaian pendidikan (%)				
SD/MI/ sederajat	95,48	97,82	98,41	98,94
SMP/MTs/ sederajat	85,23	90,13	91,08	93,33
SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33	66,13	69,68	71,71
1. Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30	63,28	63,55	64,38
PN 3 - PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing				
1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	42,76	38,53	39,74	40,90

Tabel 9 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam RPJMN

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indikator	Baseline	Realisasi	Target	
	2020	2022	2023	2024
1. Angka Kesiapan Sekolah	74,96	74,34	75,59	75,59
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,26	99,10	99,32	99,34
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	95,74	95,92	96,34	96,55
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/SMLB /Sederajat	84,53	85,49	92,80	95,00

Tabel 10 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam Renstra (APK)

Nilai kompetensi minimum Asesmen Kompetensi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Indikator	Realisasi	Target	
	2022	2023	2024
1. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum (Literasi)	59,49	49,75	52,00
2. Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum (Numerasi)	45,24	29,20	30,10

Tabel 11 Sasaran Outcome DAK Nonfisik Pendidikan dalam Renstra (AN)

BOSP dan Tunjangan Guru ASN Daerah

PN 3 Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PP 4 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

KP 1 Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

KP 2 Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

KP 3 Peningkatan Profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

KP 1 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 (di 31 SMK yang mendukung sektor makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia termasuk farmasi)

Dukungan terhadap Kebijakan Lainnya

SDGs Tujuan 4

Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran relevan dan efektif.

Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Target 4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.

Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Sasaran Outcome BOP MTB

1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum milik Pemerintah Daerah yang ditandai dengan
 - a. Peningkatan jumlah kunjungan sebesar 25% siswa/mahasiswa/peneliti/guru/dosen dari tahun sebelumnya; dan
 - b. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat umum sebesar 25% orang dari tahun sebelumnya.

2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Taman Budaya milik Pemerintah Daerah yang ditandai dengan
 - a. Peningkatan jumlah kunjungan dan pemanfaatan oleh siswa/mahasiswa/guru/dosen sebesar 25% dari tahun sebelumnya;
 - b. Peningkatan jumlah kunjungan dan pemanfaatan oleh seniman sebesar 25% dari tahun sebelumnya; dan
 - c. Peningkatan jumlah kunjungan dan pemanfaatan oleh masyarakat umum sebesar 25% dari tahun sebelumnya.

BOP MTB

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP 2 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

KP 1 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

KP 2 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya

KP 5 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan

3.3.3 Kriteria Lokasi Prioritas

Berdasarkan hasil Multilateral Meeting, Menu DAK Non Fisik Pendidikan memiliki Kriteria Lokasi Prioritas yang telah disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendikbudristek sebagai berikut

1. Tunjangan Khusus Gurusebesar daerah khusus berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Regulersebesar daerah khusus berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun satuan pendidikan yang berada pada wilayah Daerah Khusus diberikan Dana BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler sebagai berikut
 - a. Dana BOS Regulersebesar apabila jumlah peserta didik dibawah 60 maka diberikan sejumlah 60 peserta didik.
 - b. Dana BOP PAUD Regulersebesar apabila jumlah peserta didik dibawah 9 maka diberikan sejumlah 9 peserta didik.
 - c. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Regulersebesar apabila jumlah peserta didik dibawah 10 maka diberikan sejumlah 10 peserta didik.
3. Untuk museum dan taman budaya daerah yang menjadi prioritas adalah daerah - daerah yang mempunyai museum dan taman budaya yang dikelola oleh OPD dan telah distandarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA.2023

Aplikasi KRISNA DAK untuk pengusulan DAK Fisik TA 2024 telah mengakomodasi konsep ketuntasan melalui fitur “usulan by referensi”. Fitur ini memudahkan bagi pusat dan daerah karena usulan sekolah dapat dipastikan utuh

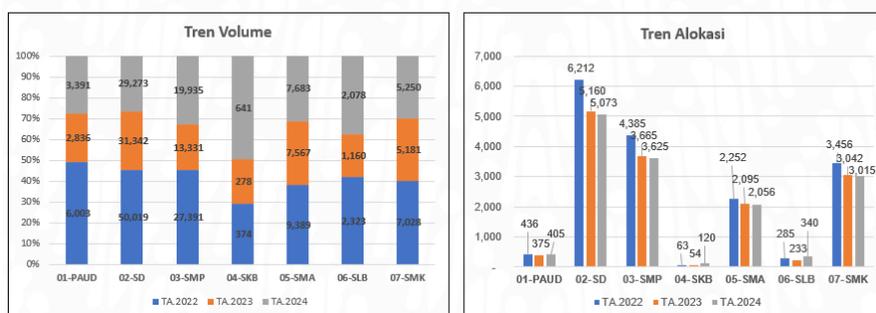
KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

mencakup semua rincian menu yang dibutuhkan sesuai dengan Dapodik. Sosialisasi ke daerah telah terus dilaksanakan agar bisa menyamakan persepsi untuk mensukseskan jalannya konsep ketuntasan. Meski demikian, tetap ada ruang perbaikan yang perlu dilakukan salah satunya terkait penetapan prioritas usulan. Prioritas usulan dibutuhkan karena banyaknya usulan DAK Fisik Pendidikan yang sangat jauh dibandingkan dengan alokasi DAK yang ada.

Terkait DAK Fisik Pendidikan, Berdasarkan **Data KRISNA DAK Fisik per Tahun**, dapat disampaikan informasi sbbbebesar

- **Fluktuasi Dana DAK Fisik per Subbidang** Pendidikan menyesuaikan Kapasitas Fiskal dan PEN akibat Pandemi COVID-19
- **Grand Total DAK Fisik** mengalami penyesuaian 16.85% pada tahun 2023 dan relative stagnan pada tahun 2024
- Alokasi per Subbidang dan Wilayah mempertimbangkan **Konsep Ketuntasan Satuan Pendidikan, Lokasi Prioritas, dan Kesiapan Readiness Criteria**
- Penambahan Rincian Menu DAK sebesar **USB SMA, SMK dan SLB** pada **Tahun 2023**. Kemudian **USB PAUD dan Asrama SMP** pada **Tahun 2024**

Subbidang	TA.2022		TA.2023		TA.2024	
	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
01-PAUD	6,003	436,344,778,760	2,836	375,484,741,498	3,391	405,374,562,216
02-SD	50,019	6,212,578,759,907	31,342	5,160,278,753,734	29,273	5,073,769,004,179
03-SMP	27,391	4,385,483,105,657	13,331	3,665,236,378,275	19,935	3,625,147,796,350
04-SKB	374	63,438,743,430	278	54,920,978,640	641	120,403,696,864
05-SMA	9,389	2,252,719,382,000	7,567	2,095,558,494,000	7,683	2,056,788,482,000
06-SLB	2,323	285,540,141,587	1,160	233,401,679,500	2,078	340,827,401,050
07-SMK	7,028	3,456,960,070,848	5,181	3,042,861,079,201	5,250	3,015,036,009,300
Grand Total	102,527	17,093,064,982,189	61,695	14,627,742,104,847	68,251	14,637,346,951,959



Tabel 12 Tren Alokasi DAK Fisik Pendidikan per Tahun

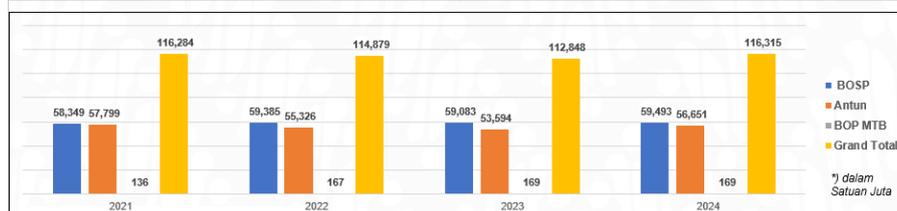
Terkait DAK Non Fisik Pendidikan, Berdasarkan **Data TKDD dalam APBN per Tahun** (djpk.kemenkeu.go.id), dapat disampaikan informasi sbbbebesar

- **Fluktuasi Dana DAK Non Fisik** Pendidikan menyesuaikan Kapasitas Fiskal dan PEN akibat Pandemi COVID-19
- **Grand Total DAK Non Fisik** mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2024 sebesar 2.98% dibandingkan tahun sebelumnya

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- **Kenaikan Alokasi BOSP** pada 2022 sebesar 1.75% dan 2024 sebesar 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya.
- **Penurunan Alokasi AnTun** pada 2022 sebesar 4.47% dan 2023 sebesar 3.23% dibandingkan tahun sebelumnya
- **Peningkatan Alokasi MTB** pada 2022 sebesar 18.84% dan 2023 sebesar 1.40% dari tahun sebelumnya
- **Penghapusan Rincian Menu BOS Afirmasi** yang terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021
- **Penambahan Rincian Menu BOP PAUD Kinerja dan BOP Kesetaraan Kinerja** pada Tahun 2024

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
BOS	53,139,018,000	BOS	54,108,304,830	BOS	53,301,942,990	BOS	53,561,695,570
Reguler	52,605,018,000	Reguler	53,387,027,330	Reguler	51,645,427,990	Reguler	52,089,779,320
Kinerja	534,000,000	Kinerja	721,277,500	Kinerja	1,656,515,000	Kinerja	1,471,916,250
Afirmasi	329,100,000						
BOP PAUD	4,014,724,000	BOP PAUD	4,254,851,290	BOP PAUD	4,047,395,950	BOP PAUD	4,009,097,820
				Reguler	3,899,870,950	Reguler	3,930,257,820
				Kinerja	147,525,000	Kinerja	78,840,000
BOP Kesetaraan	1,195,308,000	BOP Kesetaraan	1,022,244,980	BOP Kesetaraan	1,467,218,660	BOP Kesetaraan	1,618,832,360
				Reguler	1,413,263,660	Reguler	1,564,877,360
				Kinerja	53,955,000	Kinerja	53,955,000
<i>Termasuk Buffer</i>		<i>Termasuk Buffer</i>		<i>Buffer</i>	267,336,360	<i>Buffer</i>	303,930,698
BOS+BOP	58,349,050,000	BOS+BOP	59,385,401,100	BOSP	59,083,893,960	BOSP	59,493,556,448
TPG	55,360,363,813	TPG	51,990,474,366	TPG	50,450,843,688	TPG	53,337,282,097
Tamsil	454,204,000	Tamsil	1,684,280,000	Tamsil	1,476,330,539	Tamsil	1,309,031,712
TKG	1,985,007,000	TKG	1,651,287,600	TKG	1,667,081,911	TKG	2,005,621,483
Aneka Tunjangan	57,799,574,813	Aneka Tunjangan	55,326,041,966	Aneka Tunjangan	53,594,256,138	Aneka Tunjangan	56,651,935,292
Museum	103,832,000	Museum	121,900,000	Museum	125,700,000	Museum	120,300,000
Taman Budaya	32,200,000	Taman Budaya	45,700,000	Taman Budaya	44,275,000	Taman Budaya	49,675,000
BOP MTB	136,032,000	BOP MTB	167,600,000	BOP MTB	169,975,000	BOP MTB	169,975,000
Grand Total	116,284,656,813	Grand Total	114,879,043,066	Grand Total	112,848,125,098	Grand Total	116,315,466,740



Tabel 13 Tren Alokasi DAK Non Fisik Pendidikan per Tahun

Terkait DAK Fisik Pendidikan Subbidang Perpustakaan, Berdasarkan **Data TKDD dalam APBN per Tahun** (djpk.kemenkeu.go.id), dapat disampaikan informasi sbbsebesar

- Tahun 2020 alokasi DAK mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 (ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2020 dan Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2850/1/PRC.03.00/III.2020). Alokasi yang belum dilakukan kontrak saat itu dioptimalisasi untuk penanganan dampak Covid-19. Sehingga, alokasi DAK Subbidang Perpustakaan tahun 2020 yang semula Rp 450M, hanya dapat dilaksanakan sebesar Rp 74,14M.

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mayoritas alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2024 dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kebijakan DAK mendatang harus didasarkan pada data peta kondisi tingkat literasi masyarakat dan status/kelengkapan sarpras perpustakaan umum;
- Kebijakan DAK fisik yang diarahkan untuk perbaikan sarpras perpustakaan umum seharusnya dapat mendukung peningkatan literasi masyarakat, yang dapat ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca.

No	Menu/Rincian Menu	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Vol	Alokasi (Rp)	Vol	Alokasi (Rp)	Vol	Alokasi (Rp)	Vol	Alokasi (Rp)	Vol	Alokasi (Rp)	Vol	Alokasi (Rp)
1	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan												
	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi	2	31.987.881.000	0	0	1	15.000.000.000	2	29.842.506.000	0	0	0	0
	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	11	107.379.984.000	7	67.467.907.895	39	367.633.788.931	41	392.052.202.000	45	442.281.861.633		41407.584.615.593
2	Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan												
	Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota			1	4.405.155.000	20	73.921.717.000	16	62.222.443.590	4	16.567.500.000	10	43.746.768.164
	Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	68	82.837.709.600	0	0	13	19.969.272.000	7	12.581.704.925	0	0	3	7.500.000.000
3	Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan												
	Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	49	30.778.701.225	2	664.900.000	94	36.788.522.430	63	29.214.177.000	62	31.267.750.358	75	37.419.126.997
	Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	72	11.114.755.213	2	494.074.300	97	25.544.134.974	68	18.830.659.075	66	19.797.422.342	64	19.151.583.276
4	Pengembangan Bahan Perpustakaan												
	Pengadaan Bahan Perpustakaan (Cetak dan/atau Digital)	174	37.034.952.962	6	1.109.722.168	58	11.140.798.798	27	5.249.791.410	49	9.727.024.985	48	9.597.905.970
	TOTAL		300.000.000.000		74.141.759.363		549.998.234.133		549.993.484.000		524.999.999.285	241	525.000.000.000

Tabel 14 Tren Alokasi DAK Fisik Pendidikan Subbidang Perpustakaan per Tahun

3.5.1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan evaluasi atas perencanaan DAK Fisik bersama Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan Kemendagri. Dari Pagu sebesar Rp15,295 Triliun, ditetapkan dalam RK sebesar Rp15,281 Triliun (99,91% pagu), terealisasi dalam Kontrak sebesar Rp14,649 Triliun (95,78% pagu), dengan realisasi penyaluran sebesar Rp14,591 Triliun (95,40%). Persentase penyaluran terbesar di subbidang PAUD yaitu 96,19% pagu dan terendah subbidang SLB 95,40% pagu. Terdapat 1 daerah yang tidak menetapkan RK yaitu Kab. Kolaka Timur pada subbidang SKB. Terdapat 4 daerah gagal kontrak

- Kab. Nias Barat pada Subbidang PAUD,
- Kab. Kolaka Timur dan Kab. Ktai Timur pada Subbidang SKB, dan
- Provinsi Bali pada Subbidang SLB

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Subbidang	Nilai Pagu	Jumlah Daerah	Nilai RK	% RK	Nilai Kontrak	% Kontra thd pagu	Jml Daerah Kontrak	Nilai Salur	% Salur thd pagu	Jml Daerah Salur
PAUD	391.790.744.000	440	391.790.743.996	100,00%	379.194.040.514	96,78%	439	376.881.511.163	96,19%	438
SMK	3.179.649.585.000	55	3.179.649.585.000	100,00%	3.060.921.369.203	96,27%	55	3.055.356.021.286	96,09%	55
SD	5.379.606.462.000	496	5.379.522.582.584	100,00%	5.168.907.385.718	96,08%	496	5.150.419.787.916	95,74%	496
SMP	3.832.023.875.000	500	3.832.023.874.994	100,00%	3.651.499.272.089	95,29%	500	3.641.947.866.014	95,04%	500
SMA	2.195.860.011.000	64	2.195.860.011.000	100,00%	2.108.244.425.553	96,01%	64	2.086.875.454.691	95,04%	64
SKB	58.852.566.000	77	56.926.369.465	96,73%	53.248.921.349	90,48%	75	53.246.237.289	90,47%	75
SLB	257.516.757.000	31	245.096.842.194	95,18%	227.101.156.900	88,19%	30	227.238.652.814	88,24%	30
TOTAL	15.295.300.000.000		15.280.870.009.233	99,91%	14.649.116.571.326	95,78%		14.591.965.531.173	95,40%	

Tabel 15 Realisasi DAK Fisik Pendidikan Non Perpustakaan TA.2023

Terdapat 1 daerah yang memiliki kontrak tapi gagal Salur yaitu Kota Pontianak pada Subbidang PAUD. Ada 2 type metode yang digunakan di DAK 2023 yaitu type Kontraktual dan Swakelola. Metode Kontraktual yang memiliki sisa anggaran terbesar sebanyak 547 M atau 5,8% dari alokasi RK sedangkan swakelola terdapat sisa anggaran sebesar 84 M atau 1,4% dari alokasi RK.

Beberapa catatan Substansial atas evaluasi perencanaan DAK Fisik TA.2023 adalah sebagai berikut

No.	Sub Tema	Poin Evaluasi
1.	Dapodik	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi data sarana dan prasarana oleh pihak dinas masih kurang baik. Kurangnya pemahaman operator sekolah mengenai tata cara pemutakhiran data sarpras di dapodik. Updating data sarpras yang kurang dapat perhatian oleh pihak sekolah. Sekolah tidak melihat dapodik sebagai basis pengusulan
2.	Konsep Ketuntasan	<ul style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya dijalankan oleh dinas Pendidikan Pengusulan menu di sekolah tidak tuntas.
3.	Harga Satuan (<i>unit cost</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan unit cost oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kondisi lapangan Kenaikan harga satuan di pasaran pada saat pelaksanaan DAK
4.	Form PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Form PUPR tidak ada TTD Dinas Pendidikan dan PUPR Form PUPR tidak diupload dalam dapodik Nilai kerusakan tidak diinput dalam dapodik Belum sepenuhnya pemerintah daerah melakukan evaluasi kondisi sarana prasarana
5.	Verifikasi Kesiapan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Banyak sekolah yang diusulkan dan dinilai dibatalkan saat sinkron dan RK karena ketidaksiapan sesuai dengan readlines kriteria
6.	Manajemen Perencanaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Perencanaan dan bidang teknis perlu melakukan koordinasi dalam pengusulan DAK Fisik dan pelaksanaan Dak Fisik
7.	Metode Kontraktual	<p>Kontrak berdasarkan menu DAK Fisiksebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaannya tidak terkoordinasi dengan baik Untuk menu pembangunan, lokasi pembangunan tidak terpadu. Kualitas setiap bangunan dalam satu sekolah bervariasi. Tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah <p>Kontrak berdasarkan Sekolah (lokasi)sebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> Kualitas hasil pembangunan relative sama dalam satu sekolah. Kondisi antar bangunan bisa terpadu

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

8.	Metode Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Swakelola yang digunakan pemerintah daerah bermacam-macam tipe, diantaranya swakelola dengan kelompok masyarakat (P2S atau komite sekolah), ada yang swakelola dengan pihak ketiga (PUPR). • Penerapan metode swakelola berbeda dengan tahun sebelumnya, banyak Pemda masih kurang memahami swakelola yang seharusnya
9.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diperkuat koordinasi untuk pengawasan antara dinas, pelaksana pekerjaan, sekolah, dan APIP
10.	Kualitas Hasil Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat ketidaksesuaian dengan juknis/jukops

Tabel 16 Evaluasi Substansial Perencanaan DAK Fisik TA.2023

Tantangan dan Kendala Pelaksanaan DAK Fisik TA.2023 yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan secara umum adalah sebagai berikut

No.	Sub Tema	Poin Evaluasi
1.	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi penuntasan dan metode pelaksanaan secara swakelola belum sepenuhnya dipahami oleh pemda; • Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan dinas pendidikan terkait cut off dapodik untuk pengusulan DAK (pendampingan terkait form PUPR, pengisian dapodik); • Koordinasi antar OPD untuk perencanaan dan pelaksanaan DAK masih belum optimal • Bappeda terkait perencanaan dan pengusulan di Aplikasi Krisna • APIP terkait revidi laporan • BPKAD terkait penyerapan di daerah • ULP Daerah terkait pelaksanaan e-katalog ataupun lelang • Seringnya pergantian pejabat di OPD daerah • Pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan yang tidak sesuai juknis • Tenaga ahli dalam proses perencanaan dan pembuatan form PUPR terbatas. • Masih kurangnya ketaatan pemerintah daerah dalam melaporkan pelaksanaan DAK Fisik di aplikasi SIMDAK;
2.	Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat satdik yang belum memahami terkait update data sarpras pada dapodik; • Pelibatan Satdik dalam pelaksanaan secara kontraktual/penyedia tidak optimal • Terdapat satdik yang belum didatangi oleh tim teknis untuk dinilai tingkat kerusakannya; • Beberapa hasil pelaksanaan Pembangunan ruang baru tidak dilengkapi perabot, terutama Pembangunan ruang UKS, dan beberapa pekerjaan kelengkapan sarpras • Terdapat satdik yang sudah diusulkan dan dinilai namun dibatalkan saat sinkron; • Dashboard monitoring DAK Fisik yang disediakan oleh Kemenkeu belum bisa melihat sampai ke rincian satuan Pendidikan (menu, alokasi dan realisasi)
3.	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah perlu didorong memiliki strategi penuntasan sarana prasarana secara komprehensif dengan melihat pendanaan yang ada (DAK, DAU spesifik grant, APBD, CSR, sumber pendanaan lain); • Pendampingan intensif yang dilakukan oleh dinas Pendidikan ke satuan pendidikan terkait pengisian/update data sarpras di aplikasi Dapodik; • Kolaborasi dengan Kemdagri terkait perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik di daerah;

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan LKPP terkait metode pelaksanaan secara swakelola; • Kolaborasi dengan dinas PUPR terkait penilaian kerusakan bangunan; • Praktik baik pelaksanaan DAK Fisik di daerah
--	---

Tabel 17 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan TA.2023

Khusus untuk pelaksanaan DAK Fisik 2023 pada Subbidang SMA, terdapat sejumlah pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karna berbagai hal, antara lainsebesar

No	Pemda	Progress Pelaksanaan DAK
1.	Prov. Jawa Barat	Terdapat 1 sekolah tidak dilaksanakan karena ditangani oleh PUPR (SMAN 1 Cilaku, Kab. Cianjur)
2.	Prov. Jawa Timur	Terdapat 1 menu tidak dilaksanakan yaitu pembangunan lab. Kimia di SMAN 1 Tosari karena lahan tidak mencukupi
3.	Prov. Kalimantan Selatan	Terdapat 1 menu tidak dilaksanakan yaitu pembangunan jamban di SMAN Banua karena pihak pelaksana tidak sanggup melaksanakan
4.	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Hanya terkontrak 2,4 M dari Pagu 33 M. Terdapat gagal kontrak tetapi belum dapat dikonfirmasi menu apa saja karena tidak hadir saat konfirmasi.
5.	Prov. Riau	Terdapat menu rehab r kelas sebanyak 3 ruang di SMAN 1 rangsang Pesisir tidak dapat dilaksanakan karena tingkat kerusakan berat yang lebih memerlukan untuk dibangun baru.
6.	Prov. Sulawesi Barat	Terdapat menu yang gagal lelang karena di ULP tidak ada yang sesuai untuk pemenangnya. Jenis menu yang gagal lelang belum teridentifikasi
7.	Prov. Sulawesi Tengah	Terdapat menu yang tidak dilaksanakan yaitu di SMA Cokroaminoto Kab. Toli-toli karena tidak ada lahan
8.	Kota Jayapura	Terdapat 1 sekolah tidak dilaksanakan karena pemindahan kewenangan (SMAN Khusus Olah Raga) dari kab/kota ke Prov.

Tabel 18 Progress Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan

Pada Tahun 2023, terdapat 4 Unit Sekolah Baru (USB) yang disetujui/approve diantaranya adalah Kab. Memberamo Raya, Teluk Wondama, Prov. Kalimantan Tengah dan Provinsi Lampung. Sebgaian besar USB telah berproses secara fisik di atas 70% sebagaimana rincian berikut

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nilai RK
1.	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat	Pagar Dewa	Rp.6.787.128.000
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">Kondisi bangunan yang sebagian besar sudah mencapai 70% Pasangan Talud (bangunan belakang)</p>				
2.	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	Suling Tumbun	Rp.7.836.651.000

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 2 Kondisi Unit Sekolah Baru (USB) di Subbidang SMA

3.5.2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan

Total Lokus Penerima Manfaat DAKF Perpustakaan Tahun 2019-2023 di 446 Satker (Provinsi/Kab./Kota) dari 552 Satker dengan Total Pagu Anggaran Rp.2,00T seluruh Indonesia yaitusebesar

- Pembangunan Gedung 147 Paket sebesar 1,46T
- Perluasan Gedung 42 Paket sebesar 158,76M
- Renovasi Gedung 88 Paket sebesar 115,59M
- Pengadaan Perabot 271 Paket sebesar 127,97M
- Pengadaan TIK 304 Paket sebesar 75,93M
- Pengembangan Koleksi 314 Paket sebesar 64,51M

Pada Tahun 2023 Total Pagu Anggaran sebesar 525M yang tersebar di 94 Lokus dengan total 226 Paket (Disperpus Prov/Kab/Kota)sebesar

- Pembangunan Gedung 45 Paket
- Perluasan Gedung 4 Paket
- Pengadaan Perabot 62 Paket

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Pengadaan TIK 66 Paket
- Pengembangan Koleksi 49 Paket



Tabel 19 Tren Pagu Anggaran DAK Fisik Perpustakaan

Dalam rangka pelaksanaan pengerjaan DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan, pemerintah daerah harus memperhatikan waktu pelaksanaan pengerjaan sesuai dengan waktu yang tertuang dalam kontrak dan memastikan melakukan pendampingan pengawasan internal perpustakaan untuk terus memantau progres peningkatan pengerjaan fisik, terutama pembangunan, perluasan dan renovasi sehingga syarat salur setiap termin dapat diupayakan sesuai dengan ketentuan dalam syarat salur setiap tahapnya. Khusus untuk pelaksanaan menu pembangunan, perluasan dan renovasi mengupayakan proses pengerjaan selesai pada tahun yg sama (tidak lewat tahun) sehingga tahun berikutnya sudah dapat menghasilkan immediate outcome, outcome dan bahkan dampak terhadap peningkatan PISA membaca. Terdapat daerah yang tidak didapatkan nilai salurnya pada aplikasi SIKD Kemenkeu yaitu Kabupaten Polewalimandar Sulawesi Barat dengan Pagu Perabot Rp.500.000.000,-

Hasil Evaluasi Perencanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2019-2024.

- Perlu dipastikan perencanaan DED dan RAB pembangunan selesai saat pengajuan dak untuk tender pengerjaannya. Daerah yg Kontrak fisik gedungnya terlambat (mendekati batas akhir input omspan), ada indikasi pembayaran perencanaan DED dan RAB masih dibawah tangan dan pembayaran dilakukan pada tahun pelaksanaan.
- Pada menu pembangunan gedung, perlu ditambahkan keterangan titik koordinat lokasi Pembangunan gedung layanan perpustakaan dalam surat pernyataan OPD

terkait agar menghindari perpindahan lokasi Pembangunan gedung ataupun permasalahan terkait tata letak tata ruang.

- Perlu ditambahkan syarat kelengkapan dokumen untuk penerima DAK, untuk bersedia menggunakan aplikasi Inlis lite agar memudahkan jika kedepannya akan dilakukan integrasi data perpustakaan dengan aplikasi inlislite di Perpustnas
- Perencanaan DAK harus lebih berorientasi pada aspek pemanfaatan, bukan hanya target output, seperti dalam penentuan lokasi pembangunan gedung, atau jenis barang (perabot, tik, koleksi) yg akan dibeli, agar mempertimbangkan ketermanfaatan dan kebutuhan kedepannya sehingga gedung yg dibangun dan pengadaan lainnya (perabot, tik, koleksi) bisa dimanfaatkan secara optimal.
- Masih kurangnya kapasitas verifikator yg dimiliki bappeda ataupun dinas perpust daerah dalam memverifikasi
- Usulan DAK, sehingga hasil verifikasi data kurang optimal (perlu perbaikan yang berulang)
- Disamping daerah yg termasuk 3T, perlu dipertimbangkan kesiapan daerah yg akan dijadikan lokpri, agar daerah yg benar2 siap menerima dan melaksanakan DAK yg akan jadi prioritas penerima DAK4. perlu ditingkatkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan DAK

Rekomendasi pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah
Tahun 2019-2024

- Perlu disusun ulang/ditambahkan batas atas pagu setiap menu usulan DAK, untuk mengakomodasi jika ada kemungkinan penambahan TKD.
- Perlu ada kesamaan pemahaman tim penilai pusat dalam menentukan daerah/lokpri yang memiliki kesiapan dalam pengusulan DAK, hal ini dilakukan sebagai langkah prepentif dalam kelancaran pelaksanaan DAK.
- Perlu ada komitmen pemerintah daerah atas kesanggupan dalam mengalokasikan dana penunjang DAK dengan di dukung bukti dokumen penetapan RAB penunjang yang dapat diupload dalam rediness criteria Krisna, hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan inkonsisten dalam fase pelaksanaan DAK. Dalam menjaga komitmen pemerintah daerah harus menambah 2 surat pernyataan yaitu Surat pernyataan tidak akan mengubah lokasi pada fase pelaksanaan pembangunan, hal ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan sesuai dengan

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

waktu yang disepakati dalam fase perencanaan dan untuk mengantisipasi kegagalan total dan gagal salur tahap 3.

- Surat Pernyataan tidak akan mengalihfungsikan gedung layanan perpustakaan umum daerah untuk urusan lain.
- Perlu dipastikan perencana DED dan RAB pembangunan selesai saat pengajuan dak untuk tender pengerjaannya. Daerah yg Kontrak fisik gedungnya terlambat (mendekati batas akhir input omspan), indikasinya pembayaran perencanaan DED dan RAB masih dibawah tangan dan pembayaran dilakukan pada tahun pelaksana.



Gambar 2 DAK Perpustakaan 2021 Kab. Agam dan 2022 Kab. Kepulauan Tidore



Gambar 3 DAK Perpustakaan 2019 Kab.Seram Bagian Timur dan 2020 Kab.Merauke

Rekomendasi pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

- Perpustakaan Umum Provinsi yang terakreditasi C, belum terakreditasi, dan belum memiliki gedung layanan perpustakaan sebanyak 24%.
- Perpustakaan Umum Kab/Kota yang terakreditasi C, belum terakreditasi, dan belum memiliki gedung layanan perpustakaan sebanyak 59%.
- Perlunya Upaya Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan Peningkatan

kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan menuju Indonesia Emas 2045

- Sasaran dan Penerima Manfaat terbesar Perpustakaan Umum Provinsi yang terakreditasi C, belum terakreditasi, dan belum memiliki gedung layanan perpustakaan sebanyak 24%.
- Perpustakaan Umum Kab/Kota yang terakreditasi C, belum terakreditasi, dan belum memiliki gedung layanan perpustakaan sebanyak 59%.
- Perlunya Upaya Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan menuju Indonesia Emas 2045.

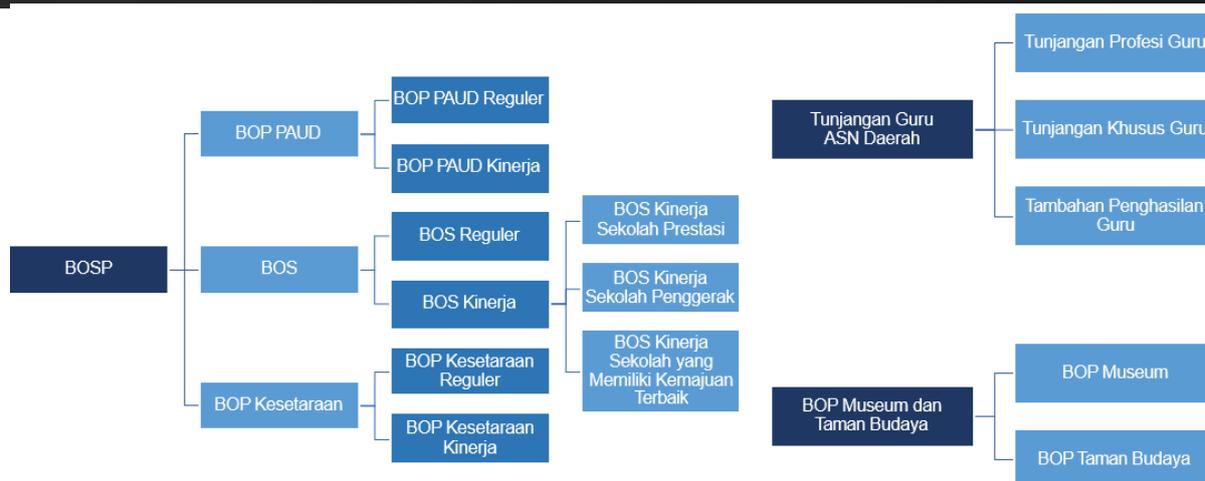
Rekomendasi pelaksanaan DAK Non Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

- Dari 251.092 tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga perpustakaan non pustakawan) hingga tahun 2023, baru sekitar 20.254 tenaga perpustakaan yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan melalui APBN Perpustakaan Nasional.
- Pentingnya tenaga perpustakaan yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola perpustakaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempercepat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Tindak lanjut dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2019 – 2024.
- Sasaran dan Penerima Manfaat Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan Non Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan) pada Perpustakaan Umum/Perpustakaan Sekolah/Madrasah tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota. Penerima manfaat adalah masyarakat yang memperoleh layanan Perpustakaan

3.5.3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Non Fisik Pendidikan

Ruang lingkup dan Jenis DAK Non Fisik Pendidikan Tahun 2023 terdiri dari beberapa Rincian Menu diantaranya adalah BOS Reguler, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Bantuan Operasional Museum & Taman Budaya.

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 4 Jenis DAK Non Fisik Pendidikan

Anggaran DAK Non Fisik Pendidikan Tahun 2023 secara total sebesar Rp.112,84T , BOSP sebesar Rp.59,08T BOP Taman Budaya sebesar Rp.169,97M dan Aneka Tunjangan Guru sebesar Rp.53,59T.

No	Jenis/Menu/Rincian	Satuan	2023	
			Volume	Anggaran
(1)	(2)	(3)		
1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan			59.083.893.960.000
i	BOS			53.301.942.990.000
a	BOS Reguler	Siswa	43.659.191	51.645.427.990.000
b	BOS Kinerja	Satdik	44.140	1.656.515.000.000
ii	BOP PAUD			4.047.395.950.000
a	BOP PAUD Reguler	Siswa	6.215.513	3.899.870.950.000
b	BOP PAUD Kinerja (Skl. Penggerak)	Satdik	3.531	147.525.000.000
iii	BOP Kesetaraan			1.467.218.660.000
a	BOP Kesetaraan Reguler	Siswa	806.010	1.413.263.660.000
b	BOP Kesetaraan Kinerja (Berkemajuan Terbaik)	Satdik	1.199	53.955.000.000
iv	buffer			267.336.360.000
2.	Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya			169.975.000.000
a	Museum	Museum	115	125.700.000.000
b	Taman Budaya	TB	23	44.275.000.000
3.	Tunjangan Guru			53.594.256.138.000
	Tunjangan Profesi Guru			50.450.843.688.000
a	Tunjangan Profesi Guru	Guru	1.109.253	50.350.843.688.000
	Buffer			100.000.000.000
	Dana Tambahan Penghasilan Guru			1.476.330.539.000
b	Dana Tambahan Penghasilan Guru	Guru	527.380	1.376.330.539.000
	Buffer			100.000.000.000
	Tunjangan Khusus Guru			1.667.081.911.000
c	Tunjangan Khusus Guru	Guru	43.206	1.517.081.911.000
	Buffer			150.000.000.000
Total				112.848.125.098.000

Tabel 20 Anggaran DAK NonFisik Pendidikan 2023

A. Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP)

Secara umum, Realisasi BOS Reguler sebesar 38T/51,7T (73,8%), Realisasi BOS PAUD Reguler sebesar 2,99T/3,96T (76,1%), Realisasi BOS Kesetaraan Reguler sebesar 1,03T/1,44T (72,9%) dan Realisasi BOS Kinerja baru akan disampaikan pada periode TW 1 2024.

Isu terkait pelaksanaan BOSP adalah Terdapat pengusulan penambahan dana BOSP Reguler TA 2023, karena

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a) adanya Kemdikbudristek menerima 34 surat dari daerah dan/atau satuan pendidikan terkait dengan usulan permohonan penambahan sasaran satuan pendidikan yang terlambat melakukan pemenuhan kriteria penerima BOSP;
- b) Pemenuhan kriteria penerima BOSP tidak dapat dilakukan setelah *cut off* 31 Agustus 2022, sedangkan masih terdapat satuan pendidikan/pemerintah daerah yang memutakhirkan data- data terkait Izin pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan; Konfirmasi menolak/menerima BOSP; Status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); dan Update rekening satuan pendidikan (31 Desember 2022).

No.	Jenis BOSP	Jumlah Prov/Kab/Kota	Satuan Pendidikan	Peserta Didik	Anggaran
1	BOS	201	999	123.102	147.528.080.000
2	BOP PAUD	371	3.784	126.983	79.400.580.000
3	BOP Kesetaraan	106	195	17.144	30.658.600.000
Total		456	4.978	267.229	257.587.260.000

Tabel 21 BA Penambahan BOSP TA.2023

- c) Perubahan target mempengaruhi alokasi BOSP di masing-masing jenis sebagai berikut. Pemenuhan anggaran bersumber dari optimalisasi alokasi anggaran di masing-masing daerah dan dana cadangan (Buffer).

Jenis BOSP	Kategori	Alokasi BOSP (Perpres 130/2022)	Potensi Tambahan (cut off 1 Maret 2023)	Pemenuhan	
				Hanya Optimalisasi Anggaran Daerah	Dana Cadangan
BOS Reguler	Jumlah Pemda	545	201	7	194
	Satdik	217.199	999		
	Peserta Didik	43.659.191	123.102		(*)
	Anggaran	51.645.427.990.000	147.528.080.000	7.898.860.000	139.629.220.000
BOP PAUD Reguler	Jumlah Pemda	509	371	41	330
	Satdik	182.465	3.784		
	Peserta Didik	6.215.513	126.983		(*)
	Anggaran	3.899.870.950.000	79.400.580.000	7.698.400.000	71.702.180.000
BOP Kesetaraan Reguler	Jumlah Pemda	505	106	4	102
	Satdik	8.161	195		
	Peserta Didik	806.010	17.144		(*)
	Anggaran	1.413.263.660.000	30.658.600.000	3.308.300.000	27.350.300.000
Total BOSP	Jumlah Pemda	545	456		456
	Satdik	407.825	4.978		
	Peserta Didik	50.680.714	267.229		(*)
	Anggaran	56.958.562.600.000	257.587.260.000	18.905.560.000	238.681.700.000

Tabel 22 BA Penambahan BOSP TA.2023 Lampiran

Dalam 4 tahun terakhir, penerapan kebijakan penyaluran langsung sangat dinamis, sehingga perlu advokasi yang intensif kepada pemda dan satdik

**KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

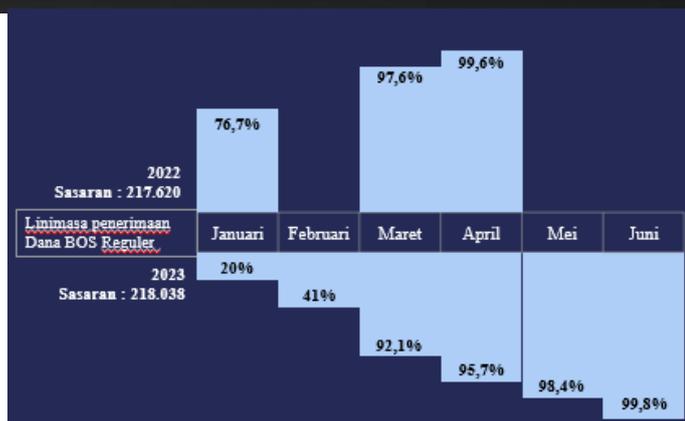
	2020	2021	2022	2023
Syarat penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan selang satu tahap (BOS) ▪ Laporan tahap sebelumnya (BOP) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekening yang standar ▪ Laporan selang satu tahap (BOS) ▪ Laporan tahap sebelumnya (BOP) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan tahap sebelumnya (BOS dan BOP)
Sisa dana		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa dana diperhitungkan pada tahap penyaluran Tahap II (Ditunda) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa dana diperhitungkan pada tahap penyaluran Tahap II 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa dana diperhitungkan pada penyaluran Tahap I
Mekanisme validasi sisa dana			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan berita acara yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan, BPKAD/APIP yang diupload di BOS Salur per satdik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfirmasi sisa dana dan hasil reviu oleh APIP pada aplikasi ARKAS/BOP Salur per satdik

Tabel 23 Kebijakan Penyaluran BOSP per Tahun

Meskipun dinamis, penyaluran dana BOSP tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari keterserapan anggaran maupun satuan pendidikan yang disalurkan. Penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar 2,11% dari tahun sebelumnya dan Jumlah satuan pendidikan yang disalurkan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,57% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, sisa dana yang diperhitungkan di tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Tahun 2022, nilai sisa dana yang diperhitungkan sebesar 846 M yang merupakan sisa dana BOS Reguler tahun 2020 dan 2021. Tahun 2023, nilai sisa dana BOS Reguler yang diperhitungkan mengalami penurunan dan dapat diindikasikan satuan pendidikan lebih optimal dalam membelanjakan Dana BOS Reguler dibandingkan tahun sebelumnya

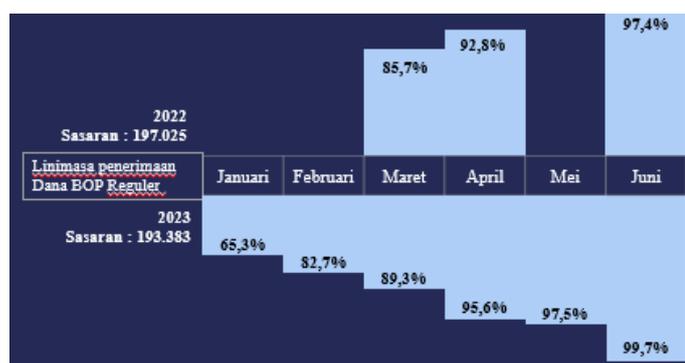
Isu pelaksanaan di BOS adalah Terdapat gap 56,7% pada penyaluran yang terjadi di awal tahun anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan, perubahan kebijakan sisa dana yang semula diperhitungkan di tahap II menjadi tahap I, serta perlunya reviu pada level satuan pendidikan menjadi kendala rendahnya penyaluran di awal tahun anggaran

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tabel 24 Linimasa Penerimaan Dana BOS Reguler

Isu pelaksanaan di BOP Terdapat gap 20,4% di awal gelombang penyaluran. Hasil evaluasi menunjukkan, adanya kebijakan perhitungan dan konfirmasi sisa dana menyebabkan penyaluran Dana BOP di gelombang awal lebih rendah dari tahun sebelumnya.



Tabel 25 Linimasa Penerimaan Dana BOP Reguler

Selain itu, masih terdapat 3.789 (0,92%) satuan pendidikan tidak disalurkan. Juga, masih terdapat 1.459 satuan pendidikan Mengalami Retur selama Penyaluran dana BOSP TA 2023, menyebabkan dana BOSP terlambat diterima oleh Satdik Evaluasi Dana BOSP Kinerja Sekolah Penggerak: Terjadi Peningkatan Skor Rapor Pendidikan dan program pengimbasan melalui Platform Merdeka Mengajar pada Sekolah penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2 yang melebihi target.

B. Aneka Tunjangan ASN Daerah

Aneka Tunjangan Guru melalui DAK Non Fisik terdiri dari Tunjangan Profesi (TPG), Tambahan Penghasilan (DTP/Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang diberikan untuk Guru PNSD & PPPK senilai 1x Gaji Pokok dilakukan 12 bulan. Tambahan

Penghasilan adalah Sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan yang diberikan untuk Guru PNSD & PPPK senilai Rp.250.000 dikalikan 12 bulan. Tunjangan Khusus Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus kepada Guru PNSD & PPPK senilai 1X Gaji Pokok dikalikan 12 Bulan. Khusus untuk TKG diberikan berdasarkan Kepmendikbudristekdikti No. 160 tahun 2021: Daerah Khusus berdasarkan Kondisi Geografis.

Alokasi Anggaran Tunjangan Guru Melalui DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Perpres No. 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan PMK 206 Tahun 2022 Tentang Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan rekomendasi penyaluran sampai dengan Triwulan IV untuk keseluruhan jenis tunjangan sudah mencapai 98%. Rekomendasi penyaluran dana cadangan atas penyampaian permohonan pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada tanggal 7 September Tahun Anggaran. Dan dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan Realisasi Pembayaran Tunjangan Guru sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 untuk ketiga jenis tunjangan sudah mencapai 61% dari total Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2023.

Berdasarkan data GTK per tanggal 5 Desember 2023, secara total pagu aneka tunjangan pada tahun 2023 yang telah disalurkan ke kasda mencapai 84.01%. Serapan terendah pada jenis dana tambahan penghasilan sebesar 54.04% dan tertinggi di jenis tunjangan TPG sebesar 85,22%.

Tunjangan	SILPA 2022	PAGU 2023			Uang di Kasda	%
		Sasaran	Alokasi	Salur		
Tunjangan Profesi Guru	796.562.483.446	1.109.253	50.350.843.688.000	42.907.419.398.440	43.703.981.881.886	85,22%
Dana Tambahan Penghasilan	231.971.318.317	527.380	1.376.330.539.000	1.003.963.989.536	1.235.935.307.853	72,94%
Tunjangan Khusus Guru	280.056.641.821	43.206	1.517.081.911.000	819.807.382.767	1.099.864.024.588	54,04%
Total	1.308.590.443.584	1.679.839	53.244.256.138.000	44.731.190.770.743	46.039.781.214.327	84,01%

Tabel 26 Penyaluran Aneka Tunjangan Guru

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan data per tanggal 5 Desember 2023, rata-rata serapan aneka tunjangan pada tahun 2023 mencapai 70,11%. Serapan terendah pada jenis dana tambahan penghasilan (DTP) sebesar 52.35% dan tertinggi di jenis tunjangan TKG sebesar 79,11%.

Tunjangan	Uang di Kasda	Realisasi 2023		Total Realisasi	%
		Realisasi Reguler	Realisasi CO		
Tunjangan Profesi Guru	43.703.981.881.886	30.355.349.377.561	407.926.565.138	30.763.275.942.699	70,39%
Dana Tambahan Penghasilan	1.235.935.307.853	593.159.750.000	53.875.100.000	647.034.850.000	52,35%
Tunjangan Khusus Guru	1.099.864.024.588	821.807.156.860	47.974.633.700	869.781.790.560	79,08%
Total	46.039.781.214.327	31.770.316.284.421	509.776.298.838	32.280.092.583.259	70,11%

Tabel 27 Realisasi Aneka Tunjangan Guru

C. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya (BOP MTB)

BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total anggaran DAK BOP MTB Pada Tahun 2023, sebesar Rp.169,97Juta dengan BOP Museum sebesar Rp.125,70Juta dan BOP Taman Budaya sebesar Rp.44,27Juta.

Museum	2022			2023		
	Jumlah	Unit Cost	Total	Jumlah	Unit Cost	Total
Museum Provinsi Tipe A	12	2.000.000.000	24.000.000.000	19	2.000.000.000	38.000.000.000
Museum Provinsi Tipe B	10	1.800.000.000	18.000.000.000	9	1.800.000.000	16.200.000.000
Museum Provinsi Tipe C	14	1.500.000.000	21.000.000.000	8	1.500.000.000	12.000.000.000
Museum Kab/Kota Tipe A		1.200.000.000	0	4	1.200.000.000	4.800.000.000
Museum Kab/Kota Tipe B	15	800.000.000	12.000.000.000	22	800.000.000	17.600.000.000
Museum Kab/Kota Tipe C	67	700.000.000	46.900.000.000	53	700.000.000	37.100.000.000
TOTAL	118		121.900.000.000	115		125.700.000.000
Taman Budaya Provinsi Tipe A	16	2.000.000.000	32.000.000.000	17	2.000.000.000	34.000.000.000
Taman Budaya Provinsi Tipe B	8	1.712.500.000	13.700.000.000	6	1.712.500.000	10.275.000.000
TOTAL	24		45.700.000.000	23		44.275.000.000

**KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

TOTAL NONFISIK MTB	DAK BOP		167.600.000.000		169.975.000.000
--------------------------	------------	--	-----------------	--	-----------------

Tabel 28 Anggaran Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya (BOP MTB)

Pada periode November 2023, Realisasi penyaluran sebesar Rp.165,11 Juta atau 97,14%. Kemudian untuk Realisasi penyerapan sebesar Rp.65,15Juta atau sekitar 38,33%.

Daftar museum dengan serapan tertinggi pada Laporan Tahap 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	MUSEUM	TIPE	PRESENTASE
1	Museum Aceh	A	50,96%
2	Museum Waja Sampai Kaputing	C	50,09%
3	Museum Gedung Perundingan Linggarjati	C	50,00%
4	Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan	C	49,97%
5	Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga	A	49,93%
6	Museum Lambung Mangkurat	A	49,92%
7	UPTD Museum Nekara	C	49,90%
8	Museum Balla Lompoa	B	49,80%
9	Museum "Pong Tiku" (Museum Pemkab, Toraja Utara)	C	49,80%
10	Museum RA Kartini Jepara	B	49,79%

Tabel 29 Angka Serapan Museum pada Laporan Tahap 1 TA.2023

Daftar taman budaya dengan serapan tertinggi pada Laporan Tahap 1 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	TAMAN BUDAYA	TIPE	PRESENTASE
1	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur	A	50,00%
2	UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	A	49,91%
3	UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah	A	49,78%
4	UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat	A	49,70%
5	UPTD Taman Budaya Provinsi Maluku	A	49,37%
6	Taman Budaya Provinsi DI Yogyakarta	A	49,32%
7	UPTD Taman Budaya Sriwijaya	A	49,31%
8	UPT Taman Budaya Jawa Timur	A	48,98%
9	UPTD Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	47,78%
10	Taman Budaya Provinsi Sumatera Utara	B	44,40%

Tabel 30 Angka Serapan Taman Budaya pada Laporan Tahap 1 TA.2023

Daftar museum dan taman budaya belum menyampaikan laporan Tahap 1 tahun 2023.

NO	MUSEUM/TAMAN BUDAYA	TIPE	ALOKASI
1	Museum Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara	C	700.000.000
2	UPT Museum Sang Nila Utama	C	1.500.000.000
3	UPT. Museum Provinsi Kalimantan Barat	A	2.000.000.000
4	UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat	B	1.712.500.000

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

5	UPT Taman Budaya Provinsi Papua	B	1.712.500.000
6	UPT Museum Pemerintah Kabupaten Belitung	C	700.000.000

Tabel 31 Museum dan Taman Budaya belum menyampaikan Laporan Tahap 1 TA.2023

Pemanfaatan & dampak DAK Nonfisik BOP MTB untuk kebutuhan Koleksi diantaranya adalah untuk pendataan koleksi, digitalisasi konten, peningkatan informasi, peningkatan tata pameran koleksi dan peningkatan kualitas kondisi koleksi. Pengadministrasian/Pendataan Koleksi menjadi lebih baik serta koleksi Museum menjadi lebih terawat sesuai standar pengelolaan permuseuman dibandingkan sebelum mendapatkan dana DAK BOP MTB. Koleksi terkelola secara digital masyarakat bisa mengakses tidak dibatasi waktu melalui social media dan aplikasi lainnya. Sehingga masyarakat bisa melek digital. Koleksi yang ada di museum menjadi makin kaya informasi karena ada kajian koleksi dan penyampaian hasil kajian koleksi ke masyarakat yang lebih faktual. Tata Pamer Koleksi di museum lebih baik sehingga pengunjung merasa lebih puas karena kebutuhan informasi tentang benda-benda koleksi dapat dipenuhi. Kondisi Koleksi Harus Lebih baik, tidak berdebu, sarang laba-laba dll.

Pemanfaatan & dampak DAK Nonfisik MTB untuk kebutuhan Masyarakat diantaranya adalah untuk peningkatan kualitas program publik, informasi, hiburan, wawasan dan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, dan peningkatan akses wilayah yang sulit dijangkau. Melalui Program Publik masyarakat jadi mengetahui keberadaan Museum dan Taman Budaya khususnya Koleksi-koleksi yang dimiliki Museum. Selain itu Meningkatnya jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya. Masyarakat juga dapat menyerap berbagai informasi melalui kegiatan-kegiatan yang menarik secara visual dan kinetik. Pada akhirnya diharapkan akan timbul apresiasi dari masyarakat dan para praktisi budaya untuk bersinergi dalam memajukan kebudayaan bangsa. Memberikan Sarana Hiburan Masyarakat Terutama Dalam Upaya Mendorong Minat Masyarakat Dalam Menambah Wawasan Dalam Bidang Perbidang Permuseuman dan membantu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui retribusi. Para Pelaku Budaya khususnya seniman terlibat dalam kegiatan museum dan taman budaya sehingga dapat membantu meningkatkan wawasan dan keterampilan. Masyarakat dapat merasakan dan melaksanakan pelatihan seni dan budaya, menikmati pertunjukan yang dilaksanakan di lingkungan Taman Budaya. Museum melaksanakan sejumlah kegiatan tidak saja di Museum tapi

juga di wilayah yang sulit dijangkau sehingga masyarakat semakin menyadari akan arti pentingnya Museum dan kebudayaan pada umumnya.

Pemanfaatan & dampak DAK Nonfisik BOP MTB untuk sarana dan prasarana diantaranya adalah untuk sarana pembelajaran, lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penerangan yang baik. Sebagai tempat atau Sarana untuk pembelajaran terkait seni dan budaya bagi masyarakat luas sehingga museum dan taman budaya dapat lebih bermanfaat. Taman, lingkungan, gedung dapat lebih tertata dan terawat dengan baik. Taman, lingkungan, gedung dapat lebih tertata dan terawat dengan baik. Kondisi Penerangan Museum dan Taman Budaya khususnya mengenai Instalasi Listrik Perlu diperbaiki, dibantu dengan APBD.

Kendala dan permasalahan pelaksanaan DAK BOP MTB di internal diantaranya adalah Kurangnya SDM yang berkompeten dibidangnya; Komunikasi Daerah dengan Pusat Masih ada yang Kurang Respon; Kondisi sarana dan prasarana yang kurang layak seperti halnya ruang tata pameran utama yang mengalami kerusakan, ruang perpustakaan, laboratorium, storage dll; Kurangnya sarana untuk mendukung kegiatan pertunjukan seperti lighting, Soundsystem dll; Belum maksimalnya kegiatan di museum dan taman budaya yang mendukung kegiatan Prioritas Nasional; Belum dibuatnya rencana kegiatan/kalender event dari museum dan taman budaya; Perbaikan-perbaikan mengenai label koleksi sehingga informasi koleksi yang masih minim; Storyline koleksi Museum masih sangat kurang sehingga kurang dipahami oleh pengunjung, bahkan ada yang sudah puluhan tahun belum dirubah.

Kendala dan permasalahan pelaksanaan DAK BOP MTB di eksternal diantaranya adalah keterlambatan penyaluran Dana di Bakeuda ke MTB/ Belum terkoordinasi dengan baik antara OPD dengan BPKAD dalam pencairan anggaran maupun pelaporan; Dari kendala tersebut, apakah untuk pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya dapat dilakukan penyaluran anggaran langsung ke pengelola museum sehingga pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; Pergantian atau Perpindahan SDM Museum dan Taman Budaya yang begitu cepat; Anggaran APBD yang masih sangat kurang untuk mendukung kegiatan dari museum dan taman budaya; Perubahan DPA dalam APBD yang harus mengikuti jadwal revisi; Penyesuaian harga di SIPD dan LPSE berbeda, Sehingga terjadinya SILPA; dan Adanya Maintenance Aplikasi Aladin DJPK Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah (Pemrov, Pemkab/Pemkot) mengenai evaluasi pelaksanaan DAK NF Museum dan Taman Budaya; Melakukan pendampingan kepada penerima DAK NF BOP MTB dalam rangka penguatan program dan pengelolaan DAK NF BOP MTB; Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima DAK baik secara Luring maupun Daring; dan Koordinasi dengan Baik antara Kementerian, OPD, Museum / Taman Budaya Maupun dengan BPKAD.

Rekomendasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOP MTB ke depan diantaranya adalah melaksanakan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelatihan, koordinasi, program publik, koleksi, SDM pengelola, penganggaran APBD, dan peningkatan kualitas aplikasi ALADIN. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM khususnya pengelola museum sehingga dapat berkompeten dibidangnya serta rotasi pegawai dimuseum yang harus dibatasi; Kemudian perlu ada koordinasi yang baik antara OPD dengan BPKAD terkait pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya khususnya pencairan anggaran dan pelaporan; Penguatan program publik, khususnya di Museum untuk memaksimalkan penggunaan media teknologi dengan menggunakan audio visual dalam menceritakan/medeskripsikan koleksi museum serta berkaitan dengan program prioritas nasional; Perlu dilakukan penyusunan storyline koleksi Museum sehingga koleksi apa yang disampaikan dapat dipahami oleh pengunjung; Penambahan jumlah SDM pengelola museum dan Taman Budaya yang perlu jadi perhatian dari Pemerintah Daerah; Penganggaran dari APBD memadai dalam rangka pemajuan kebudayaan melalui ruang publik dalam hal ini Museum Provinsi/Kabupaten/Kota. Terutama untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya fisik seperti perbaikan ruang tata pameran, perbaikan perpustakaan, storage koleksi. Termasuk pengadaan peralatan sebagai penunjang kegiatan seperti pertunjukan, ataupun pengadaan koleksi museum; Terkait error diaplikasi aladin diharapkan museum ataupun taman budaya terus berkoordinasi baik dengan BPKAD dan DJPK Kementerian Keuangan dibantu kemendikbudristek.

3.5 Hasil Evaluasi Tematik DAK Tahun 2023: Pemanfaatan Peralatan Praktik Utama Siswa di SMK

Pengelolaan DAK bidang pendidikan melibatkan pemerintah pusat hingga daerah. Setiap tingkatan pemerintah memiliki tugas yang berbeda. Pada tingkat pusat, pengelolaan DAK pendidikan meliputi sebesar (1) kesiapan data teknis; (2) kesiapan

penyusunan petunjuk teknis; (3) kesiapan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis; dan (4) kesiapan dalam pelaporan pencapaian target kinerja. Di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, pengelolaan DAK pendidikan meliputi sebesar (1) melaksanakan pemetaan sasaran DAK; (2) melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan DAK di tingkat sekolah; (3) melaksanakan DAK sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kemdikbud; dan (4) melaporkan hasil pelaksanaan DAK kepada provinsi dan pusat.

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan/atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala SKB penerima alokasi DAK Fisik secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Provinsi dan kabupaten/ kota penerima alokasi DAK Fisik pendidikan mengalokasikan DAK sesuai target output tahun anggaran berkenaan yang telah ditetapkan;
4. Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman pada harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), kecuali dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mekanisme pembayaran terhadap proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan secara non tunai (*cashless*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Provinsi/ Kabupaten/ Kota mengoptimalkan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran berkenaan dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang pendidikan untuk wilayah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan menggunakan metode penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola oleh P2S dibantu oleh fasilitator yang dibentuk oleh Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali untuk satuan pendidikan yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Fakta di lapangan menunjukkan pengerjaan melalui swakelola ini lebih berjalan baik daripada pengerjaan melalui pihak ketiga lewat mekanisme kontrak. Mekanisme swakelola menempatkan sekolah untuk dapat mengatur dana bantuan hingga selesai pembangunan. Sementara itu, untuk pengadaan sarana pendidikan standar peralatannya ditentukan oleh Direktorat PSMK. Hal ini yang terkadang tidak sesuai kualitasnya dengan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan (SMK). Perlu adanya pelibatan pihak sekolah untuk dapat menentukan kebutuhan alat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Kepala Daerah harus menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III Perpres Nomor 5 Tahun 2018. Laporan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. Sementara itu, penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pelaporan ini dilakukan dengan *sharing* data antara Menteri Keuangan,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri teknis terkait, dan Gubernur.

3.5.1 Pemantauan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Daerah

Selain melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat pusat, pemantauan juga dilaksanakan di tingkat daerah. Pada tahun 2023, tematik DAK Fisik difokuskan kepada Pemanfaatan Peralatan Praktik Utama dan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK. Sedangkan tematik DAK Non Fisik difokuskan kepada Pemanfaatan Bantuan Operasional di Museum dan Taman Budaya. Selama tahun 2023 dilakukan lima kali studi lapangan serta diskusi ke daerah dengan mengunjungi sekolah, museum, taman budaya dan instansi terkait, selain itu telah dilaksanakan diskusi pembahasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK di tingkat Pusat bersama K/L terkait.

3.4.2 Kunjungan ke Kota Bandung, Jawa Barat

SMKN 4 Bandung mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2023 dengan rincian Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp.1,1M dan Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.450juta. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode swakelola. Bantuan DAK dimanfaatkan untuk konsentrasi keahlian multimedia. Kondisi RPS di SMKN 4 Bandung saat ini kekurangan sehingga dilakukan pemanfaatan ruang kelas sementara menjadi ruang praktik. Proses Pembangunan RPS sudah dilakukan analisis oleh PUPR dan telah diselesaikan secara prosedural kesiapannya. Selain gedung yang representative, diperlukan peralatan yang termutakhir sesuai dengan kebutuhan industri sesuai dengan output, khususnya berkenaan dengan kebermanfaatan. Pencairan DAK dilakukan bulan Juli sehingga belum bisa menilai terkait kesesuaian alat. Namun demikian, Spek alat yang akan didapat adalah sesuai kompetensi dan ketersediaan pagu anggaran. Terkait Pengadaan Peralatan Praktik Utama solusi yang dilaksanakan adalah berkerjasama dengan industri sebagai cara agar siswa dan guru dapat diakomodasi di industri (untuk praktik) khususnya di bidang manufaktur dan IT. Problem yang dihadapi adalah miskomunikasi misalnya saat pengadaan alat, ternyata alat mangkrak beberapa waktu karena sekolah belum tau cara pemakaiannya. Namun setelah koordinasi dengan

industri terkait, alat jadi terpakai karena sudah mengetahui cara penggunaannya.



Gambar 5 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 4 Bandung, Jawa Barat

SMKN 13 Bandung mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2023 dengan rincian Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp.1,3M dan Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.450juta. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode Swakelola. Bantuan DAK dimanfaatkan untuk konsentrasi keahlian Kimia Analis. DAK sudah disusun dan diajukan sejak tahun 2022, dan prosesnya tidak langsung mengajukan DAK, namun sekolah secara periodik mengupdate Dapodik, di mana di dalamnya terdapat bagian menu “kerusakan”. Dari segi kerusakan lebih dari 45% dan sudah disampaikan ke Dapodik serta sudah diverifikasi oleh PUPR. Lahan untuk Pembangunan RPS sudah disiapkan dan masih berproses secara prosedural. Pada Oktober 2022, Sekolah sudah mengajukan penghapusan aset dan dokumen ijin bongkar sudah siap menggunakan pendanaan dari komite. Besarnya sejumlah Rp.1,6juta karena hanya atap saja. Untuk ijin bongkar keseluruhan belum keluar dan diupayakan agar segera selesai hingga tahap pembangunan. Pemanfaatan sangat diperlukan oleh siswa karna kondisi saat ini yang masih kekurangan RPS dan Peralatan Utama untuk mendukung peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Lulusan SMKN 13 Bandung.



Gambar 6 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 13 Bandung, Jawa Barat

SMKN 7 Bandung mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2022 dengan rincian Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.900juta. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode Swakelola. Terdapat beberapa alat yang masih belum digunakan dikarenakan memerlukan instalasi khusus sehingga perlu persiapan khusus. Misalnya, alat praktik teknik elektro dengan tegangan 2000 watt sehingga perlu memperbaiki jaringan listrik terlebih dahulu yang pengerjaannya akan dilaksanakan pada saat libur. Kendala alat lain yang mangkrak juga karena masih dalam proses perpindahan lab dan butuh lab dengan kapasitas yang besar. Kemudian beberapa alat masih memerlukan pelatihan oleh penyedia dan praktisi yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. SMKN 7 mengharapkan adanya pengadaan tambahan anggaran untuk komponen instalasi dan penunjang. Secara khusus, beberapa contoh alat yang masih belum beroperasi dengan optimalsebesar

1. Muffle Furnice

Bantuan DAK 2022, sudah dimanfaatkan oleh murid2 jurusan Analisis Pengujian Lab. di SMKN 7 Bandung untuk Praktik sejak pengadaan. Alat digunakan untuk memanaskan pada suhu diatas 600 derajat Celcius pada praktikum analisis gravimetri utk penetapan kadar abu & mineral dalam sampel.

2. Ekstraktor Soxhlet Otomatis

Alat yang digunakan untuk menentukan kadar lemak pada suatu sampel melalui proses ekstraksi. DAK 2022 masih belum digunakan karena perlu dipasang instalasi air masuk dan air keluar serta instalasi listrik yang memadai (1 mesin 2000 watt). Saat ini masih sedang proses persiapan instalasi. Siswa sementara ini melakukan praktek menggunakan ekstraktor Soxhlet secara manual.

3. GC (Gas Chromatography)

Digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi, menguji kemurnian zat tertentu, memisahkan komponen yang berbeda dari campurannya, serta mengidentifikasi suatu senyawa. DAK 2020, baru selesai instalasi listrik dan grounding serta pemasangan PC dan UPS. Sudah selesai di instalasi oleh teknisi dari thermo scientific siap digunakan dan akan diadakan training untuk guru dan laboran di bulan juli 2023.



Gambar 7 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 7 Bandung, Jawa Barat

3.4.3 Kunjungan ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat

SMKN 1 Cibinong mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2022 dengan rincian Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp.913juta dan Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.500juta. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode swakelola. Dalam upaya kesiapan usulan DAK Fisik, sekolah telah membuat proposal, menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi baik laporan keuangan maupun laporan fisik. Rincian Menu yang diajukan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Koordinasi telah dilakukan bersana Disdik Provinsi Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan. Secara umum, pemenuhan prasarana dan pengadaan sarana melalui DAK Fisik 2022 belum menuntaskan kebutuhan sekolah, terkait dengan rasio kebutuhan alat dan jumlah siswa, masih kurang jumlah peralatannya.

Sekolah mengoptimalkan penggunaan ruang dan peralatan DAK Fisik untuk kegiatan pembelajaran, dengan membuat Jadwal Penggunaan Ruangan. Kendala yang dihadapi pada saat pembangunan DAK Fisik adalah faktor cuaca atau hujan, sehingga ada beberapa hari pekerja harus lembur agar bisa menuntaskan pembangunan sesuai waktu yang ditentukan. Pengadaan peralatan Praktik DAK sudah mendukung industri 4.0 yang disesuaikan dengan kompetensi dasar, untuk pemeliharaan dibuat jadwal maintenance dan SOP penggunaan peralatan. Beberapa peralatan praktik utama yang diadakan melalui Bantuan DAK Fisik Pendidikan 2022 adalah Trainer kelistrikan dasar; Trainer basic pneumatik; Trainer basic elektropneumatik; Trainer motor stepper; Trainer liquid mix; Trainer programmable logic controller dan Trainer motor dan transformer maintenance dan test serta beberapa peralatan TIK dan penunjang lainnya sesuai kebutuhan.



Gambar 8 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 1 Cibinong, Jawa Barat

SMKN 2 Cibinong mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2022 dengan rincian Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp.913juta dan Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.450juta. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode swakelola. SMKN 2 Cibinong memiliki 5 jurusan, salah satu yang paling populer adalah broadcasting. Jumlah Rombel total ada 28. Kondisi guru untuk sekarang masih mencukup. Sebagian besar guru produktif merupakan tenaga honorer yang berasal dari luar bogor, seperti Tangerang dan Bandung. Ada masalah terkait RPS dan kelas yang tidak mencukupi. Contoh, satu auditorium untuk mewadahi beberapa kelas, satu ruangan besar digunakan untuk rekaman bersamaan dengan kegiatan praktik lainnya. Terkait peralatan, jika melihat kondisi sekarang sebenarnya tidak ada masalah karena sudah mencukupi dan sesuai standar SMK sekarang. Namun untuk menuju 4.0, harusnya masih bisa ditambah.

Terkait pengadaan peralatan, secara keseluruhan apa yang didapatkan pada tahun 2022 sudah sesuai dengan yang diusulkan. Namun ada beberapa detail, seperti beberapa media support yang belum up to date. Dari anggaran 450 juta, diantaranya didapat peralatan sebagai berikut Kamera. Peralatan Controlling Unit, Switcher, Test

cam, Audio record, Lighting, Softbox, Alat editing, komputer, Meja, Kamera, Kamera Portable, Smart Screen Pemeliharaan alat kalo bisa ditangani sendiri, ditangani sendiri. Kalo harus ganti device, harus ke toko yang bersangkutan. Terkait RPS, ada ketidaksesuaian. Saat pengadaan dalam bentuk kosongan (tanpa mebleuir). Padahal di RAB ada. Awalnya mau dari provinsi, namun akhirnya gajadi. Akhirnya pengadaan sendiri menggunakan dana dari DAK tersebut. RPS yang dibangun sekarang hanya digunakan untuk jurusan broadcasting saja. Jika ada bantuan lagi, maka sudah disiapkan ruang dengan menambah lantai menjadi lantai 2, karena lahan terbatas. Terkait Pembangunan RPS berjalan cukup lancar, termasuk perihal pelaporan. Ada sedikit kendala terkait cuaca karena hujan

SMKN 2 Cibinong juga mendapat bantuan dari BOPD, namun mayoritas digunakan untuk kepegawaian, sehingga alokasi untuk keperluan lain kecil. Ada rencana ke BLUD. Namun masih terkendala belum adanya teaching factory. Sudah diarahkan kesana sebenarnya, yang mulai terlihat adalah perhotelan. Secara lebih lanjut, sudah ada diskusi dengan pihak provinsi, namun saat ini belum ditindaklanjuti dari sekolah. Rencana tahun 2023 akan dikejar teaching factory ini

Rincian menu DAK Fisik yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemudian sudah dilaksanakan koordinasi dan peran pemerintah Daerah dan Pusat sangat baik karna selalu memberikan informasi yang cepat jika ada sesuatu yang perlu di sampaikan terkait progres pembangunan. Sosialisasi didapatkan melalui Bimbingan Teknis. Sejauh ini bantuan Program DAK Fisik sangat membantu dengan terbuktnya terakomodirnya kegiatan belajar mengajar untuk jurusan broadcast meskipun kebutuhan ruang belajar atau praktek masih belum terpenuhi semuanya. Dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran maka Strategi yang dilaksanakan oleh sekolah adalah mendayagunakan semua fasilitas yang telah di berikan baik itu DAK fisik berupa RPS maupun alat praktek sehingga semua siswa dapat melaksanakan kegiatan KBM dengan optimal sesuai dengan ketuntasa kurikulum dan tentunya peran serta para guru yang lebih intensif dalam pelaksanaan pembimbingan kepada para siswa. Kendala yang di hadapi saat pelaksaan kegiatan setelah anggaran turun adalah kenaikan harga bahan bangunan yang sudah tidak sesuai lagi dengan RAB, termasuk standar upah. Saran yang bisa di sampaikan adalah secara kebijakan kiranya paket paket DAK Fisik dan non fisik agar lebih di perbanyak lagi jumlahnya dan secara teknik sudah di siapkan model model mutakhir yang akan menjadi panduan pelaksanaan bagi setiap kompetensi keahlian

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menu	Rincian Perabot
Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – sesuai jurusan	a. Meja dan Kursi = 87 set b. White Screen = 2 unit c. Meja Komputer Tempered Glass Informa = 2 unit d. Kursi Putar Renberged = 2 unit
Pengadaan peralatan praktik utama – sesuai jurusan	a. Kamera Studi (Sony MC2500) = 3 unit b. Kamera ENG (Electronic News Gathering System) Sony AX43 = 2 unit c. CCU (Camera Control Unit) Unbrand/USA = 1 unit d. Lampu Studio (Ezmode) = 2 unit e. Pengalih Pencampuran Audio Video (Audio Video Mixing Switcher) AV Matrix = 1 unit f. Microphone (Audio Technica / AT 2035 = 2 unit g. Audio Recorder (Tascam / DR 60D = 2 unit h. Komputer Editing (Dell Optiplex 7780 = 7 unit i. Tripod (Unbrand / China) = 4 unit j. Kamera Digital (Sony/ZV-E10) = 2 unit k. Monitor Control (Lenovo T24t-20 = 2 unit l. Prosesor Audio (SPL Audio /DP 480 = 1 unit

Tabel 32 Tabel Rincian Bantuan Peralatan di SMKN 2 Cibinong, Jawa Barat

SMKN 2 Cibinong mendapatkan Bantuan RPS dan Peralatan Praktikum untuk Jurusan Broadcasting. Bantuan DAK sangat membantu sekali mengingat jurusan Produksi dan siaran program TV (Broadcast) di SMKN 2 Cibinong ini sama sekali belum memiliki Ruang Praktek Siswa (0%) sehingga dengan adanya bantuan DAK yang terealisasi pada tahun 2022 beserta alat-alat bantu praktek, pada saat ini siswa dapat belajar dan mempraktekan ilmunya yang di dapat secara teori menjadi sesuatu kegiatan belajar yang menyerupai asli pekerjaan seorang broadcaster. RPS bangunan yang telah berhasil dibangun sangat baik sesuai gambar RAB dan memiliki segi manfaat dari peruntukan setiap ruangan yang sudah jadi sebagai mana usulan yang di harapkan. Pemanfaatan RPS di Sekolah ini karena Siswa Broadcast dari tiap angkatan masing-masing 2 rombel maka dari 3 angkatan semuanya berjumlah 6 rombel maka kegiatan praktekum di lakukan bergiliran sesuai jadwal yang telah di atur dalam satu minggu. Mengingat keterbatasan ruang kelas belajar maka penggunaan RPS ada 2 ruang kelas yang cukup besar yang di dimanfaatkan oleh kelas 11 sebanyak 2 kelas sebagai tempat kegiatan belajar teori. Kualitas Alat Praktikum Siswa di Sekolah sudah bisa digunakan untuk Industri 4.0 Urgensi alat praktek bagi siswa adalah

- a. Untuk membantu siswa mengenal alat yang sebenarnya dalam rangka memperkuat pemahaman teoritis.
- b. Membantu siswa dalam memperagakan sebuah kegiatan atau proyek materi pelajaran

- c. Mempelajari karakter atau sifat-sifat atau tatacara kerja dari sebuah alat yang diperlukan dalam proyek Broadcast
- d. Memberikan pengetahuan tentang tata cara penyimpanan yang baik dan tata cara pemeliharaan yang baik agar alat bisa bermanfaat lama

Sebagai SOP yang di terapkan oleh sekolah dalam hal ini penanggung jawab KAPROG Broadcast, maka yang pertama harus di persiapkan adalah

- a. Tempat penyimpanan , agar alat dapat di simpan di tempat yang sesuai tidak mudah terkena debu, atau kotoran, sirkulasi udara yang baik dengan suhu udara ruangan yang terjaga
- b. Sistem administrasi pencatatan peralatan (ASET) KIB Kartu Inventaris Barang dan KIR Kartu Inventaris Ruangan serta pencatatan pemimjaman

C. Perawatan pasca penggunaan agar alat di simpan dalam kondisi bersih serta aman.



Gambar 9 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 2 Cibinong, Jawa Barat

PKBM Anak Panah mendapatkan bantuan DAK Non Fisik. PKBM Anak Panah berdiri sejak tahun 2018 dengan SK Ijin Operasional No. sebesar 421.10/081/00013/DPMPSTSP/2018 dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sebesar P9970540. PKBM Anak Panah adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya di daerah Tajurhalang. PKBM Anak Panah bekerja sama dengan 4 Pondok Pesantren dan 2 Sekolah Sepak Bola untuk mendukung kegiatan Pendidikan Kesetaraan dengan sistem MoU, diantaranya adalah

- a. Pondok Pesantren Al Hawthah Al Jindaniyah
- b. Pondok Pesantren Al Aimmatul Arba'ah
- c. Pondok Pesantren Riyadhul Muhibbin

- d. Pondok Pesantren Yatim dan Dhuafa Sawaussabil
- e. Sekolah Sepak Bola Persija Jakarta
- f. Sekolah Sepak Bola Persikabo Bogor

Guna meningkatkan nilai mutu sekolah didaerah Tajurhalang. PKBM Anak Panah berencana melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam Program beasiswa gratis. Setidaknya saat ini PKBM Anak Panah telah menjalin kerjasama dengan 4 ponpes di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan untuk memberikan legalitas berkas jenjang pendidikan peserta didik melalui program ini setidaknya bisa menjangring keikutsertaan santri, dalam menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

PKBM Anak Panah memiliki jumlah murid 747 dan jumlah guru 17. Alokasi Dana BOSP yang diterima sebesar Paket A (214.500.000) , Paket B (370.500.000) Paket C (408.500.000). PKBM telah menyusun rencana anggaran untuk operasional sekolah (RKAS) melalui pengarahannya, penyusunan dari dinas pendidikan Kab.Bogor.diketahui penilik dan disahkan oleh kepala dinas Kab.Bogor. PKBM memiliki 3 komponen penggunaan terbesar dana BOSP yaitu Honor Guru, sarana pembelajaran (komputer dan pc) , kertas cetak. PKBM memiliki 3 komponen penggunaan terkecil dana BOSP yaitu transport dinas , fotocopy , persiapan ujian (UK, ANBK). Semua Guru di PKBM adalah 100% Non ASN , besar pembiayaan gaji yaitu 50% dari BOSP. PKBM telah rutin menyampaikan Laporan Penggunaan Dana BOSP setiap 6 bulan sekali. Perubahan kebijakan terkait dana BOS pada tahun 2023 yang dirasakan sekolah yaitu lebih fleksibel dalam penggunaan tidak dibatasi persentasenya. Hasil evaluasi terhadap penggunaan dana BOS pada tahun sebelumnya yaitu perlunya optimalisasi belanja melalui SIPlah. Tidak terdapat kendala dan permasalahan terkait isu penggunaan Dana BOSP.



Gambar 10 Kunjungan Lapangan DAK di PKBM Anak Panah Cibinong, Jawa Barat

3.4.4 Kunjungan ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

SMKN 1 Mataram mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2022 dengan rincian Pembangunan Ruang Praktik Siswa sebesar Rp.1,15M dan Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.1,0M. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode swakelola. Dalam upaya proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi DAK Fisik sudah berkoordinasi dengan fasilitator. Rincian Menu yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Koordinasi dan peran Pemda/Pusat dalam mendukung proses kelancaran DAK Fisik yaitu Pemda (Dinas Dikbud NTB) sangat mendukung dengan menempatkan fasilitator sejak perencanaan sampai serah terima RPS dan asisten Alat yang praktik yang standar industri. Sekolah sudah mendapatkan sosialisasi Program DAK Fisik dengan baik. DAK dirasakan masih belum menuntaskan kebutuhan Sekolah. Sumber pembiayaan lain yang digunakan adalah dana BOS. Strategi Sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran, melalui optimalisasi bantuan DAK Fisik ke depan adalah melaksanakan pembelajaran berbasis *Teaching Factory* dan Skema BLUD.

Kendala/Tantangan yang dihadapi oleh Sekolah terkait DAK Fisik adalah Keterbatasan tenaga kerja bangunan keterlambatan suplayer memasok bahan bangunan sehingga memperlambat progres pekerjaan. Rekomendasi untuk pelaksanaan DAK Fisik ke depan adalah waktu pelaksanaan dipercepat untuk mengantisipasi hambatan di lapangan sehingga progres pekerjaan dapat optimal dan terlaksana dengan berkualitas.

Urgensi Pembangunan/Rehabilitasi RPS di Sekolah melalui DAK Fisik sangat diperlukan dikarenakan kondisi RPS umumnya baik, tapi masih banyak kebocoran yang membahayakan peralatan. Pemanfaatan RPS di sekolah dirasa sangat bermanfaat dan digunakan untuk proses pembelajaran setiap hari di Sekolah. Urgensi Pengadaan Alat Praktik Utama di Sekolah sangat penting. Peralatan utama diantaranya adalah untuk *Teaching Factory* Konsentrasi Keahlian Tata Busana yang terdiri dari Mesin bordir, mesin jahit, mesin obras, meja potong, gunting listrik, meja pola, dan lain-lain. Kualitas Alat Praktik sudah mendukung kemajuan Industri 4.0 dengan memperhatikan kualitas alat, spesifikasi alat, operasional alat, suku cadang alat. Perawatan dan pemeliharaan alat praktik utama di sekolah dilakukan sesuai dengan Operasional sesuai petunjuk dan mendatangkan teknisi secara berkala.

Strategi utama Sekolah dalam meningkatkan kualitas mutu dan keterampilan siswa adalah sebagai berikut

1. Refocussing sebesar Refocussing bertujuan untuk membentuk SMK yang fokus dan konsisten terhadap bidang keahlian yang diajarkan. Saat ini SMK Negeri 1 Mataram berfokus pada bidang keahlian Seni dan Ekonomi Kreatif dan Bisnis Manajemen, yang dimulai saat PPDB tahun pelajaran 2022/2023.
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem tata kelola di sekolah yang berperan sebagai legalitas layanan usaha yang dikomersilkan agar SMK menjadi lebih fleksibel dan mandiri dalam membangun pembelajaran berbasis produk dan mengelola aset sekolah.
3. Teaching Factory (TEFA) adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis industri yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri dilaksanakan dalam suasana nyata seperti yang terjadi di industri dan bertujuan agar siswa mengalami pengalaman pembelajaran yang nyata.
4. Project Based Learning (PjBL) Pembelajaran berbasis Proyek merupakan kegiatan eksplorasi dan interpretasi hasil belajar peserta didik dalam proses belajar bersama guru.
5. Bursa Kerja Khusus (BKK) BKK merupakan lembaga yang dibentuk di SMK sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, Pendaftaran pencari kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, sebagai mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi P1 (LSP-P1) LSP P1 merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang terlisensi dari BNSP dan didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didik.
7. Kerjasama Pelatihan dan Pemagangan Guru/Siswa Kerjasama dilakukan bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk meningkatkan kompetensi keahlian bersama para ahli dan industri yang telah kompeten di bidangnya.



Gambar 11 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 1 Mataram, NTB

SMKN 7 Mataram merupakan SMK Pusat Keunggulan yang mendapatkan bantuan SMKPK Reguler Tahap 1 sebesar Rp.1,30M untuk Penguatan Pembelajaran, Pembelian Alat dan Bantuan Fisik Lainnya pada Tahun 2022 dan SMKPK Reguler Lanjutan sebesar Rp.150juta untuk Penguatan Pembelajaran. Sekolah sudah mendapatkan sosialisasi untuk pelaksanaan SMK PK melalui web DitSMK dan Tata Kelola. Sekolah sudah memiliki roadmap pengembangan ke depan. Upaya sekolah untuk kesiapan pelaksanaan adalah membentuk tim SMK PK dalam bentuk kepanitiaan pada masing-masing kegiatan (fisik, non fisik, peralata, dan pelaporan) dan Sekolah membangun kemitraan dengan IDUKA. Sekolah terus meningkatkan pembelajaran berbasis IDUKA dengan melaksanakan kegiatan guru tamu dan guru magang serta pemanfaatan berbasis teknologi informasi. Sekolah juga melaksanakan kegiatan workshop penyelarasan kurikulum sekolah dengan IDUKA.

Pembelajaran dari pelaksanaan Program SMK PK adalah adanya peningkatan kualitas dan kinerja di bidang pendidikan vokasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, program didukung dan diperkuat oleh kerjasama dan kemitraan DUDI, dukungan dari Pemda dan PTV setempat. SMK PK semakin relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang berbasis 4.0. Pembelajaran lain yang dirasakan adalah peningkatan kompetensi pembelajaran praktik sesuai skala industri dengan adanya guru tamu. Kemudian peningkatan pengetahuan dan pengembangan Teaching Factory (TEFA).

Peran Sekolah dalam pelaksanaan Program SMK PK adalah Pihak sekolah maupun industri sangat mendukung dan membantu kegiatan-SMKPK baik dalam bidangsebesar Kurikulum Berbasis Problem-Based Learning (PBL) dan Soft Skillssebesar Program ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek/industri,pengembangan kurikulum, teaching factory, dan pengajar dari DUDI; Pengembangan Sarana dan Prasaranasebesar Program SMK PK juga melibatkan-pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaranberbasis industri; dan Pelatihan Kepala SekolahsebesarKepala sekolah akan menjalani pelatihan untukmemimpin perubahan di sekolah, mengelola kerja sama dengan DUDI, danmengembangkan roadmap pengembangan SMK PK.

Melalui program ini, Sekolah merasakan perubahan positif yang signifikan dalam pembelajaran, kurikulum, peningkatan karakter peserta didik melalui Profil Pelajar Pancasila, dan penyelarasan kurikulum dengan industri. Selain itu, program ini pun dapat membangun imej positif, komitmen sekolah menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan program SMK PK. Sekolah berkomitmen dalam mencetak SDM unggul,

yakni melalui kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana dan prasarana, kolaborasi, serta kejelian dalam melihat peluang kerja sama, sehingga SMK memiliki daya tawar kepada pihak luar (DUDI). Program SMK Pusat Keunggulan mendorong sekolah menengah kejuruan atau SMK bekerja sama dengan industri, baik industri besar, menengah, maupun kecil. Program ini memungkinkan setiap SMK bekerja sama dengan lebih dari satu industri. Kerja sama juga bisa dijalin dengan industri dari luar kota atau industri lintas sektor. Industri di dalam dan luar negeri boleh berpartisipasi. Hal ini untuk mendukung dunia kerja dan dunia industri di masa depan dengan menyediakan SDM tangguh, unggul, dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk mencetak lulusan yang profesional dan siap kerja. Karenanya sebagian besar lulusan SMK diarahkan untuk langsung bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Kurikulum yang diterapkan di SMK, komposisinya pun dirancang lebih mengedepankan praktik keterampilan dari pada teori di kelas. Perbandingan itulah yang membuat lulusan SMK lebih siap menghadapi tantangan kerja daripada lulusan SMA

Beberapa hasil yang dicapai pada proses pembelajaran adalah adanya pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana dan prasarana, kolaborasi, serta kejlesleian dalam melihat peluang kerja sama, sehingga SMK memiliki lulusan yang siap dan unggul di bidangnya. Sebelumnya sekolah belum memiliki ruang Desain, Ruang Bordir dan Mesin Industri dan setelah mendapatkan SMKPK Perubahan yang terjadi sejalan dengan pengembangan memiliki Ruang Desain dan Ruang Bordir, Memiliki mesin industri seperti mesin jack, over dack, obras jack, komputer serta software desain dan alat bordir 2 kepala. Terkait lulusan, adanya beberapa siswa yang sudah bisa membuka usaha sendiri dirumah. Hanya 1% yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.

Kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan SMK PK adalah Penyesuaian waktu dengan pihak industri terkait woeshop dengan guru tamu, Penyampaian materi dari pihak industri ke siswa kurang, dan Ruang Praktek yang masih kurang memadai. Beberapa masukan untuk perbaikan pelaksanaan SMK PK ke depan adalah

1. Pengumuman dan pemberitahuan penerapan SMKPK lebih awal agar pelaksanaan bisa lebih maksimal
2. Pencairan dana lebih awal dan tambahan anggaran SMKPK untuk pembelian alat dan bahan sesuai kebutuhan
3. Sekolah bisa lebih fleksibel menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan

4. Penyampaian materi narasumber dari balai lebih fokus agar bisa tepat sasaran sesuai output yang diharapkan
5. Diharapkan balai besar bisa mengeluarkan sertifikat bagi peserta workshop SMKPK



Gambar 12 Kunjungan Lapangan SMKPK di SMKN 7 Mataram, NTB

Museum Nusa Tenggara Barat mendapatkan bantuan DAK dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Tipologi Museum NTB adalah Museum Umum dengan Jumlah SDM Pengelola sebanyak 25 PNS dan 29 Tenaga Kontrak. Pemanfaatan DAK diperuntukan Pengelolaan Koleksi, Program Publik, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Dengan adanya Dana DAK Jumlah Pengunjung semakin meningkat dan Frekuensi Kunjungan Bertambah Anggaran Pengelolaan per Tahun (APBD, DAK, Sumber Lainnya) dengan rincian sebagai berikut

1. 2020 DAK (Rp. 1.800.000.000) dan APBD (Rp. 1.720.245.955)
2. 2021 DAK (Rp. 1.800.000.000) dan APBD (Rp. 1.164.962.200)
3. 2022 DAK (Rp. 1.800.000.000) dan APBD (Rp. 978.383.225)
4. 2023 DAK (Rp. 1.800.000.000) dan APBD (Rp.1.424.564.660)

Pada periode November 2023, Museum NTB telah merealisasikan DAK Non Fisik Rp.1,12M atau 62,64% dari total pagu, sementara APBD sebesar Rp.1,11M atau 78,10% dari total pagu. Secara keseluruhan Museum NTB telah merelaisasikan Rp.2,24M untuk pelaksanaan kegiatan atau 69,47% dari total pagu sebesar Rp.3,22M.

NO	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	DAK NON FISIK	1.800.000.000	1.127.499.750	672.500.250	62,64
2	APBD	1.424.564.660	1.112.632.952	311.931.708	78,10
	Total	3.224.564.660	2.240.132.702	984.431.958	69,47

Tabel 33 Realisasi Anggaran Museum NTB berdasarkan SP2D per November 2023

Beberapa Program Kegiatan unggulan yang dimiliki terkait Program Publik adalah sebagai berikut

A. Program/Kegiatan Publik

1. Pameran temporer
2. Belajar Bersama (Belajar Bersama Di Museum, Kuliah Di Museum, Bedah Naskah Lontar, Museum Untuk Disabilitas dan Podcat Museum)
3. Museum Keliling (Museum Masuk Sekolah dan Pameran Keliling)
4. Lomba Edukatif Kultural di Museum (Mewarnai, Lomba Karya Remaja dan Festival Gasing)
5. Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum (Publikasi Museum)

B. Program/Kegiatan Unggulan

1. Lomba Mewarnai dan Lomba Foto Story
2. Pameran Temporer dan Museum Keliling
3. Sekolah Filologika
4. Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM)

Museum NTB memiliki ciri khas unggulan yang dikembangkan yaitu SEGA atau Sekardiyu Audio Guide adalah alat berwujud barcode yang berguna untuk memandu pengunjung dengan media suara.

Pemeliharaan Sarpras belum optimal terpenuhi dikarenakan jenis sarana dan prasarana yang boleh dipelihara dari dana DAK terbatas (sesuai Juknis). Pelayanan teknis mengacu pada SOP dan survey kepuasan pengunjung. Mekanisme Monev secara berkala dilakukan dengan dengan melaksanakan rapat

evaluasi setiap akhir bulan dan setiap selesai pelaksanaan kegiatan. dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemda, keterlibatan NGO dalam kegiatan museum serta partisipasi masyarakat dalam bentuk kunjungan ke museum.

Tantangan atau kendala yang dihadapi adalah UP yang diberikan terlalu kecil; Proses pembuatan SPM Masih di induk; Dana DAK pengelolaannya disatukan dengan dana APBD; Dukungan Dana APBD untuk Program Publik masih Rendah

Strategi pelaksanaan ke depan yang dilakukan oleh Museum NTB adalah KAK harus siap sejak perencanaan, pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan. Perencanaan kegiatan berorientasi public/peningkatan kunjungan demikian pelaksanaannya. UPT Museum mengusulkan penambahan; UP dengan persentase minimal 10% atau 20% dari total pagu; Proses Pembuatan SPM dilakukan di Museum karna Museum juga mengelola DPA sendiri; Agar dana DAK pengelolaannya di pisahkan dari dana APBD; UPT Museum mengusulkan penambahan dana APBD untuk menunjang kegiatan pada program publik.



Gambar 13 Kunjungan Lapangan DAK di Museum NTB



Gambar 14 Fitur Scan Barcode Museum NTB Sekardiyu Audio Guide (SEGA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (UPTD TB NTB) mendapatkan bantuan DAK dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang digunakan untuk pemanfaatan kegiatan Publik dan Pemeliharaan Sarpras Taman Budaya NTB. Dengan adanya DAK TB untuk pengunjung dari tahun ke tahun bertambah dan program publik yang dilaksanakan semakin berkualitas.

Berbagai program yang diselenggarakan Taman Budaya antara lain, gelar seni pelajar, festival, festival musik, pementasan tetap, pameran tetap, seni tradisional, pementasan olah seni, dan temu karya Taman Budaya. Selain itu, Taman Budaya juga

membuka kelas Olah Seni setiap minggu sore yang diikuti 275 siswa dari TK hingga SMA. Dengan dibantu tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Taman Budaya membuka kelas Tari, musik modern dan tradisional, seni rupa, pantomim, dan olah vokal. Komunitas Akarpohon adalah salah satu komunitas yang produktif berkegiatan di Taman Budaya. Ida Karwayu selaku program manager komunitas sastra yang dibentuk tahun 2009 silam ini menceritakan kemudahan akses yang diberikan oleh Taman Budaya. Selain untuk seniman daerah, Taman Budaya juga terbuka untuk berkolaborasi dengan seniman nusantara dan Internasional. Pertunjukan Teater Koma yang akan tampil misalnya, atau Musisi Malaysia yang telah berkolaborasi dengan para musisi NTB dalam pentas seni di Taman Budaya beberapa waktu lalu.

Pemeliharaan Sarpras melalui DAK dirasa masih belum optimal karna masih terbatas oleh Juknis. Standar Pelayanan belum terpeuhi namun dilakukan upaya kerjasama dengan para stakeholder, pemerhati seni, seniman, budayawan, dan masyarakat yang peduli terhadap kesenian. Taman Budaya sudah melakukan monev terhadap berbagai kegiatan seni yang dilakukan oleh Taman Budaya. Dukungan dari Pemda dirasa masih sangat minim terlihat dari anggaran yang diberikan masih terbatas.

UPTD TB NTB aktif melaksanakan kegiatan masyarakat bulanan mulai dari pameran kesenian dan pertunjukan kebudayaan yang sangat antusias didatangi oleh masyarakat sekitar. Tahun 2023 dilaksanakan Pameran Seni Rupa yang bekerja sama dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek dengan tema Pagelaran Seni Transisi Budaya Pop dan Warna Baru NTB atau “REKAM” yang dilaksanakan pada Tanggal 14-20 November 2023 di Gedung Galeri TB NTB. Event ini menghadirkan karya Lukisan dari Maestro Pelukis Terkenal dan juga pendatang baru untuk mewadahi segala bentuk ekspresi budaya sekaligus melestarikan dan menumbuhkan kecintaan masyarakat NTB terhadap budaya asli Indonesia. TB NTB juga aktif melakukan kampanye media sosial terkait Budaya melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan Youtube.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah pencairan dana pada sanggar yang tidak memiliki rekening, sehingga sanggar diminta untuk membuat rekening sendiri atau menggunakan rekening sanggar lain. Terkait upaya untuk perbaikan ke depan diharapkan pencairan keuangan tidak berbelit-belit dan pencairan dari BPKAD harus melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah perlu kebijakan yang mengatur agar bisa lebih cepat dilaksanakan.



Gambar 15 Kunjungan Lapangan DAK di Taman Budaya NTB

3.4.5 Kunjungan ke Kota Surabaya, Jawa Timur

Taman Budaya Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kesenian di Jawa Timur pada umumnya. Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) yang dikenal selama ini adalah sebagai ruang publik bagi berlangsungnya kegiatan seni dan budaya. Masyarakat mengenalnya sebagai tempat diselenggarakannya pergelaran kesenian di Gedung Cak Durasim, Pendopo Jayengrana, Galeri Prabangkara atau di bagian lain dalam kompleks Taman Budaya. Sebagian lagi mengenalnya sebagai tempat latihan menari, teater, musik, menggambar/melukis, pedalangan dan seni-seni lainnya. UPT Taman Budaya, diberikan tugas menyelenggarakan kegiatan terkait tugas dan fungsinya antara lain sebesar a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya; b. pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya; c. peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni; d. peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat; e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni budaya; f. penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni; g. pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya; h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. UPT. Taman Budaya juga menjalin kerjasama dengan dengan pihak dan lembaga yang memiliki kepedulian pada pengembangan Taman Budaya untuk turut serta memberikan usulan, evaluasi, serta inovasi sebagaimana yang dimuat dalam Undang – Undang No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana perkembangan kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional.

Sejak berdiri tahun 1978, Taman Budaya Jawa Timur mengalami berbagai dinamika yang menjadikan institusi ini memiliki tempat tersendiri di kalangan pelaku dan penikmat seni khususnya. Sungguh menjadi harapan semua pihak, bahwa keberadaan Taman Budaya Jawa Timur dapat memberikan makna dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan seni budaya, seniman dan juga masyarakat pada umumnya. Anggaran Pengelolaan per tahun sebesar

Tahun	Jenis	Anggaran
2020	APBD	Rp. 2.123.382.280
	sebesar	
	DAK sebesar	Rp. 1.750.000.000
2021	APBDsebesar	Rp. 2.626.710.000
	DAK sebesar	Rp. 1.750.000.000
2022	APBDsebesar	Rp. 6. 429.657.513
	DAK sebesar	Rp. 2.000.000.000

Tabel 34 Anggaran DAK Taman Budaya Cak Durasim Jawa Timur

Dewan Kesenian Jawa Timur yang menjadi mitra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pengembangan kebudayaan di Jawa Timur sebagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) didirikan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tahun 1998 untuk menjalankan amanat Inmendagri 5A/1993, di bawah koordinasi dan sinergi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Disbudpar Jatim). Sebagai mitra DKJT memberikan masukan terkait program pengembangan kebudayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa kebijakan yang dilaksanakan oleh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu bentuk kebijakan yang berdasarkan masukan dari DKJT yang dilaksanakan oleh UPT. Taman Budaya berupa pembinaan dan pementasan seni teater teater. Departemen Teater DKJT bersama dengan UPT. Taman Budaya melaksanakan pendampingan dan pendukung pada Teater API, sebagai salah satu komunitas teater yang ada di Jawa Timur yang mempunyai program kegiatan pementasan keliling Indonesia.

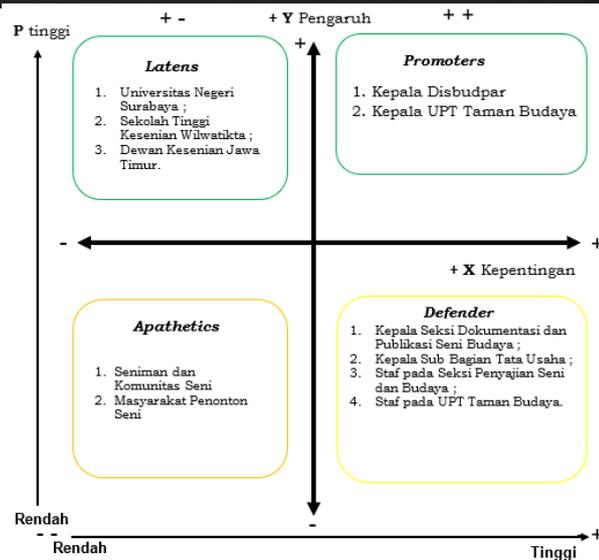
UPT. Taman Budaya, Disbudpar Provinsi Jawa Timur mendapatkan DAK Kemendikbudristek sejak tahun 2019 hingga sekarang. Penggunaan DAK di UPT Taman Budaya, mengacu pada panduan yang diberikan yaitu Program Publik sebesar 65 % berupa pertunjukan kesenian dan workshop kesenian, Pemeliharaan sarana dan prasarana 35 % berupa perawatan gedung/bangunan, serta Langganan Daya dan

Jasa sebesar 5% berupa langganan Internet dan upgrade Aplikasi Cak Durasim. Dana Alokasi Khusus ini sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah kunjungan di UPT Taman Budaya karena dari dukungan DAK tersebut menambah item kegiatan kesenian yang dilaksanakan selain yang didukung dari APBD serta kegiatan lain yang dilakukan seniman/komunitas seni secara mandiri. Pemanfaatan DAK di UPT Taman Budaya untuk kegiatan publik berupa Pergelaran Kesenian Wayang Kulit, Teater Tradisional / Non Tradisional, serta Fasilitasi Kesenian dimana kami bekerjasama dengan komunitas seni yang ada di Jawa Timur untuk membangun jejaring yang lebih luas untuk pengembangan Taman Budaya melalui kegiatan festival, parade, pameran, dan lomba kesenian.

Pemeliharaan sarana dan prasarana melalui DAK di tahun 2023 ini telah terlaksana dan terpenuhi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung di UPT Taman Budaya. UPT. Taman Budaya, Disbudpar Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020 telah ditetapkan masuk dalam kategori A, serta juga telah mendapatkan sertifikasi CHSE di tahun 2020 sehingga secara pelayanan baik untuk seniman serta masyarakat kami telah mendapatkan pengakuan yang baik, meskipun tetap terus berusaha meningkatkan layanan agar pengakuan tersebut dapat kami tingkatkan kedepannya atau minimal dapat dipertahankan.

UPT. Taman Budaya sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatannya tentunya tidak akan terlepas dari arah kebijakan Gubernur Jawa Timur, akan tetapi usulan serta rancangan kegiatan yang disusun tidak akan terlepas dari evaluasi, masukan, dan inovasi berbagai pihak yang dipilih dan dipilah untuk kemudian disusun menjadi program dan agenda kegiatan.

KOORDINASI PENYUSUNAN DAK LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 16 Stakeholders UPT Taman Budaya Cak Durasim, Jawa Timur

Langkah-langkah yang dilakukan berupa peningkatan SDM di UPT Taman Budaya dengan mengikutsertakan mereka pada workshop, seminar serta aktif berdiskusi dan mentoring dengan seniman profesional/budayawan yang memiliki kepedulian dengan pengembangan Taman Budaya sehingga terjadi proses belajar secara berkelanjutan untuk perbaikan pelayanan untuk seniman dan masyarakat. Selain itu juga menjalin sinergi dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kegiatan serta layanan sebagai berikut

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan materi sajian kesenian baik berupa gelar atau pameran seni.
2. Menampilkan materi kesenian terbaik yang telah melalui kurasi dari kurator yang kompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Taman Budaya Jawa Timur.
3. Disamping mengandalkan APBD dan APBN sebagai penopang kegiatan kesenian, Taman Budaya Jawa Timur juga mengadakan bentuk kerjasama dengan pihak luar (konsul jendral, organisasi/sanggar kesenian, seniman dll.) untuk turut serta meramaikan suasana berkesenian di ruang-ruang kesenian yang di miliki oleh Taman Budaya Jatim baik itu Galeri, Gedung Kesenian Cak Durasim, Pendapa Jayengrana, maupun Panggung Terbuka.
4. Menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan terutama sekolah-sekolah yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk berkunjung ke Taman Budaya Jawa Timur dalam rangka mengenalkan segala fasilitas kesenian dan aset kesenian yang dimiliki oleh Taman Budaya Jawa Timur. Hal itu dimaksudkan disamping sebagai bentuk studi

lapangan para siswa sekolah yang berkaitan dengan pelajaran seni budaya juga salah satu bentuk usaha pemajuan kebudayaan.

5. Senantiasa menerima kritik dari masyarakat yang bersifat membangun di bidang kesenian terutama yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Taman Budaya Jawa Timur.

Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan baik untuk kegiatan program publik, perbaikan sarana dan prasarana, maupun langganan daya dan jasa. Untuk evaluasi program publik dibantu para seniman dan budayawan dalam mengawal setiap materi tampilan dan konten kesenian selain rutin melakukan evaluasi beserta staf Pamong Kebudayaan dan Analis Seni Budaya Daerah yang ada di UPT Taman Budaya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat semakin baik. Evaluasi dan monitoring untuk perbaikan sarana dan prasarana serta langganan daya dan jasa kami menggunakan angket kepuasan pengunjung yang kami olah datanya yang kemudian kami pergunakan sebagai pijakan untuk pembenahan selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung pemajuan Taman Budaya, hal ini terbukti dengan dukungan yang diberikan sehingga UPT Taman Budaya, Disbudpar Provinsi Jawa Timur dapat terus eksis dalam kegiatan kebudayaan di Jawa Timur, selain organisasi selain pemerintah juga memberikan peran yang sangat berarti dimana melalui mereka, Taman Budaya dapat meluaskan jejaring pengembangan kebudayaan di Jawa Timur, serta mengembangkan konten-konten kegiatan yang lebih baik dan menarik. Namun tak kalah pentingnya peran Masyarakat pengunjung Taman Budaya yang memberikan support dalam pelaksanaan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut mensosialisasikan kegiatan.

Kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan alokasi DAK ini adalah terkait pencairan anggaran yang tidak dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga pemanfaatan dana DAK ini tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan di awal tahun. Selain itu beberapa kali mengalami keterlambatan dalam penyampaian / transfer anggaran sehingga berpengaruh dalam perencanaan yang sudah kami lakukan. Terkait masukan disampaikan agar alokasi DAK ini dapat direalisasikan pada awal tahun sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik, dan tidak menumpuk pada akhir tahun serta pencairan anggaran DAK mohon kedepan bisa sesuai dengan rencana yang telah disosialisasikan sehingga perencanaan pun akan terlaksana dengan baik.



Gambar 17 Kunjungan Lapangan DAK di Taman Budaya Cak Durasim, Jawa Timur

3.4.6 Kunjungan ke Kota Malang, Jawa Timur

SMKN 4 Malang mendapatkan Bantuan DAK pada Tahun 2022 dengan rincian Pengadaan Peralatan Praktik Utama sebesar Rp.2,43M. Pengelolaan DAK dilakukan dengan metode swakelola. Upaya melakukan optimalisasi DAK Fisik pada proses perencanaan dengan melakukan observasi kebutuhan jurusan, pelaksanaan dengan melakukan pengajuan jurusan kebutuhan jurusan melalui aplikasi, dan monitoring dengan melaksanakan pencatatan kedatangan barang, pendistribusian, dan inventarisasi barang. Rincian menu 90% sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Peran Pemda sudah cukup baik dalam mendukung proses kelancaran DAK Fisik selain itu sekolah juga telah mendapatkan sosialisasi Program DAK Fisik Tahun 2022. Selain DAK, sekolah juga menggunakan bantuan dana dari BOS dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Jawa Timur. Peralatan yang didapat dari bantuan DAK Fisik digunakan secara maksimal untuk kegiatan praktek siswa. Alat praktik siswa belum sepenuhnya up to date sesuai dengan kebutuhan industri. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih peralatan praktik utama adalah Spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan praktik siswa dan Dimensi alat karena harus menyesuaikan dengan RPS. Perawatan dan pemeliharaan alat praktik utama di sekolah dilakukan dengan melakukan pengecekan pada alat praktik secara berkala dan melakukan pembersihan rutin dan menyimpan alat di tempat yang aman.

SMKN 4 Malang merupakan salah satu SMKN Unggulan yang telah memiliki berbagai peralatan dan RPS yang lengkap dan memiliki kondisi baik. Selain itu, telah dilaksanakan kerja sama untuk skema BLUD antara Konsentrasi DKV, Teknik Logistik dan TKJ untuk melaksanakan proses produksi beberapa pernak-pernik dan juga

desain untuk berbagai event di Daerah. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Pemda dan DUDI. SMKN 4 Malang juga memberikan kesempatan pada peserta didik disabilitas untuk turut membantu dalam proses pelaksanaan dan terjun langsung ke dunia magang agar siap bekerja dan berwirausaha. SMKN 4 Malang mendukung peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja. Di sisi lain, terdapat data kebutuhan untuk revitalisasi sebagai berikut

NO	TEMUAN KERUSAKAN GEDUNG	KETERANGAN
1.	Plafon Ruang Praktek	Jebol
2.	Pintu	Handle pintu rusak
3.	Lantai	Lantai pecah
NO	TEMUAN KERUSAKAN BARANG	KETERANGAN
1.	Komputer	Spesifikasi kurang sesuai dengan kebutuhan
2.	Meja	Rusak
3.	Kursi	Rusak
4.	Mesin Cetak	Perlu service
5.	Mesin Potong	Perlu service
6.	Printer	Cartridge rusak
NO	KOMPETENSI	KETERANGAN
1.	Teknik Logistik	RPS, Komputer, meja, kursi
2.	DKV	RPS, Komputer, kamera, meja, kursi
3.	TKJ	RPS, Komputer, meja, kursi
4.	Informatika	RPS, Komputer, meja, kursi
5.	Perhotelan	RPS, Komputer, meja, kursi

Tabel 35 Temuan Kebutuhan RPS dan Peralatan di SMKN 4 Malang, Jawa Timur

Terdapat beberapa alat yang fungsinya kurang sesuai dengan kebutuhan jurusan sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal sehingga ke depan diperlukan konfirmasi ulang terkait dengan pengajuan kebutuhan alat sekolah sebelum dilaksanakan pengadaan. Misalnya, Belt Conveyor (DAK 2022) belum digunakan karna ruangan tidak mencukupi dan daya listrik yang tidak memadai. Saat ini alat diletakan di kantin sekolah dan hanya digunakan untuk pengenalan komponen mesin kepada peserta didik.



Gambar 18 Kunjungan Lapangan DAK di SMKN 4 Malang, Jawa Timur

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan Dana Alokasi Fisik dan Nonfisik bidang Pendidikan telah terlaksana dengan baik untuk periode perencanaan TA.2024 dan pelaksanaan TA.2023. Proses perencanaan DAK TA.2024 agar dapat dilaksanakan lebih awal mengingat proses penilaian usulan awal daerah, penetapan kebijakan pada Multilateral Meeting, penetapan lokasi prioritas, hingga fase sinkronisasi harmonisasi dan Rencana Kerja (RK) memakan waktu yang cukup panjang.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2023, beberapa kendala teridentifikasi terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik. Kendala tersebut mencakup rumusan arah kebijakan, penentuan lokasi prioritas, kriteria penerima, hingga penilaian yang sesuai dengan alokasi yang tersedia. Meskipun demikian, implementasi konsep ketuntasan sekolah pada DAK Fisik diharapkan dapat meningkatkan fokus pada penyelesaian kebutuhan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap. Pada aspek DAK Fisik Subbidang Perpustakaan TA 2023, terdapat tantangan terkait penetapan lokasi prioritas yang tidak sesuai dengan alokasi yang diberikan. Penting untuk merumuskan kembali kebijakan DAK untuk Tahun Anggaran 2024, khususnya terkait pengusungan lokasi prioritas agar sesuai dengan proyeksi yang direncanakan. Perencanaan DAK Nonfisik, terutama Bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengalami perubahan konsep dengan penekanan pada kinerja sekolah penggerak, prestasi, dan rapor pendidikan terbaik. Namun, diperlukan rumusan indikator keberhasilan BOS Kinerja agar manfaatnya dapat terlihat jelas. Peningkatan anggaran DAK dari tahun ke tahun perlu diikuti dengan perbaikan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi KRISNA-DAK, sebagai inisiasi baik untuk perencanaan DAK Fisik sejak TA 2019 perlu dipertahankan untuk meningkatkan transparansi. Meskipun demikian, masih terdapat sarpras rusak yang belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan, menunjukkan perlunya validasi data Dapodik dengan kondisi riil di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu berperan aktif dalam koordinasi dan konsultasi teknis. Terdapat pula beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus pada DAK Subbidang Perpustakaan, seperti pemerataan penerima DAK, sinergi dengan kebijakan lain, peningkatan kualitas pelayanan, dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti swasta, komunitas, perguruan tinggi, dan OPD terkait. Sinergi dan koordinasi perlu diperkuat melalui forum help desk untuk memastikan pelaksanaan DAK berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif pada pendidikan di tingkat daerah.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pengadaan ruang praktik dan alat praktik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah berjalan dengan baik. Adanya alokasi dana ini memberikan dampak positif terhadap fasilitas pembelajaran di SMK, khususnya dalam meningkatkan kualitas ruang praktik dan ketersediaan alat praktik. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para siswa dapat mengoptimalkan pembelajaran praktik yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Selain itu, peningkatan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing lulusan SMK di dunia kerja. Dengan demikian, pelaksanaan DAK Fisik ini tidak hanya mendukung peningkatan infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap mutu pendidikan di SMK. Namun demikian, masih terdapat temuan di beberapa daerah terkait alat praktik yang masih belum digunakan secara optimal akibat adanya keterbatasan kapasitas ruangan dan operasional pelaksanaan.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi Pelaksanaan Tematik DAK Fisik Ruang Praktik Siswa dan Pengadaan Alat Praktik Utama Siswa diantaranya adalah

1. Perbaiki tahap perencanaan dan sinkronisasi bersama Pemda untuk menyesuaikan kebutuhan SMK terkait Pengadaan Peralatan di Tahun selanjutnya. Perlunya Standarisasi Juknis Peralatan;
2. Koordinasi bersama Pemda terkait Optimalisasi Pemanfaatan Peralatan Praktik DAK 2022 & 2023 yang masih belum difungsikan hingga saat ini melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk efektivitas dan peningkatan kualitas pembelajaran;
3. Melakukan verifikasi kebutuhan dan memastikan kebermanfaatannya dari Bantuan Peralatan DAK Fisik SMK.

4. Memastikan kesiapan Pemda dan Satuan Pendidikan dalam operasional melaksanakan bantuan DAK yang berupa peralatan dan ruang praktik siswa. Misalnya kesiapan ruangan untuk peralatan, kesiapan daya listrik yang tersedia, dan kesiapan pengoperasian barang yang diterima oleh Satuan Pendidikan

Rekomendasi Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan TA.2023-2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan harus berbasis kebutuhan dan diutamakan untuk penyelesaian revitalisasi sekolah dengan kondisi rusak berat dan juga daerah afirmasi sesuai dengan kriteria lokasi prioritas yang telah disepakati;
2. Pemerintah daerah perlu didorong memiliki strategi penuntasan sarana prasarana secara komprehensif dengan melihat pendanaan yang ada (DAK, DAU spesifik grant, APBD, CSR, sumber pendanaan lain);
3. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh dinas Pendidikan ke satuan pendidikan terkait pengisian/update data sarpras di aplikasi Dapodik;
4. Kolaborasi dengan Kemdagri terkait perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik di daerah;
5. Kolaborasi dengan LKPP terkait metode pelaksanaan secara swakelola;
6. Kolaborasi dengan dinas PUPR terkait penilaian kerusakan bangunan;
7. Perlunya peningkatan pengecekan kualitas (*quality checking*) dan kesiapan aplikasi antara KRISNA dan E-Planning dalam proses pengusulan, sinkronisasi dan RK sehingga pendataan dapat tepat waktu dan tervalidasi dengan baik
8. Perlunya melakukan evaluasi Rincian Menu yang masih sedikit disetujui, urgensi kebutuhan Rincian Menu tersebut, dan kesiapan Daerah memenuhi Readiness Criteria. Misalnya, Rincian Menu Pembangunan USB PAUD di TA.2024 hanya satu Daerah yang diterima.

Rekomendasi Pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan TA.2023-2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi prioritas harus diikuti dengan penyediaan alokasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada lokasi prioritas dengan berbasis pemerataan, kesiapan kriteria teknis dan hasil evaluasi kinerja daerah;
2. DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah sebagai upaya penguatan budaya literasi masyarakat dan percepatan transformasi pelayanan perpustakaan

berbasis inklusi sosial, melalui: 1) Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan 4) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;

3. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan keadilan dalam menyediakan layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan secara merata di seluruh wilayah NKRI.

Rekomendasi Pelaksanaan DAK NonFisik Pendidikan TA.2023-2024 diantaranya adalah sebagai berikut

1. Perlu dilakukan koordinasi yang baik antara OPD dengan BPKAD terkait pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Museum dan Taman Budaya khususnya pencairan anggaran dan pelaporan;
2. Penganggaran dari APBD memadai dalam rangka pemajuan kebudayaan melalui ruang publik dalam hal ini Museum Provinsi/Kabupaten/Kota. Terutama untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya fisik seperti perbaikan ruang tata pameran, perbaikan perpustakaan, storage koleksi. Termasuk pengadaan peralatan sebagai penunjang kegiatan seperti pertunjukan, ataupun pengadaan koleksi museum;
3. Penambahan jumlah SDM pengelola museum dan Taman Budaya yang perlu jadi perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.96. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.104. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.125. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.126. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No.11. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DIREKTORAT AGAMA, PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2023